

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT KECUKUPAN MODAL, BONUS
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH, DAN SUKU BUNGA KREDIT BANK
UMUM KONVENSIONAL TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (Periode 2005 - 2008)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA**

2010

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT KECUKUPAN MODAL, BONUS
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH, DAN SUKU BUNGA KREDIT BANK
UMUM KONVENSIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK
MUAMALAT INDONESIA
(PERIODE 2005-2008)**



Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif

2010

Jakarta, 19 Agustus 2010

Dosen Pembimbing Skripsi

Co Pembimbing Skripsi

(Nugroho Endropranoto SE., MBA)

(Isbandini Veterina SE.,)

TANDA PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Nurmillah
NIM : 200612057
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Kecukupan Modal,
Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan Suku Bunga
Kredit Bank Umum Konvensional Terhadap Pembiayaan
Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia
(Periode 2005-2008).

Tanggal Ujian Komprehensif : 20 September 2010

Penguji :

Ketua : Ari Sunardi, SE., M.Si, Akt

Anggota : 1. Nugroho Endropranoto, SE., MBA
2. Novi Silvia Dewi, SE., MM

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif dengan hasil LULUS.

Penguji,

Ketua,

(Ari Sunardi, SE., M.Si, Akt)

Anggota I,

Anggota II,

(Nugroho Endropranoto, SE., MBA)

(Novi Silvia Dewi, SE., MM)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurmillah
NIM : 200612057
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Kecukupan Modal,
Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan Suku Bunga
Kredit Bank Umum Konvensional Terhadap Pembiayaan
Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia
(Periode 2005-2008).

Dosen Pembimbing Skripsi

Co Pembimbing Skripsi

(Nugroho Endropranoto SE., MBA)

(Isbandini Veterina SE.,)

Tanggal Lulus: 20 September 2010

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian

Ketua Jurusan Manajemen

(Ari Sunardi, SE., M.Si, Akt)

(Etika Karyani, SE., Ak, MSM)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa petunjuk dan kebaikan jalan yang sempurna, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Kecukupan Modal, Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan Suku Bunga Kredit Bank Umum Konvensional pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2005-2008)”** dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Nugroho Endropranoto, SE., MBA, selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Mba Isbandini Veterina, SE., selaku dosen pendamping skripsi yang telah banyak memberikan ide dan pengarahan serta menyempurnakan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Siti Sundari Arie selaku Ketua STIE-IBS dan Bapak Dr. Siswanto selaku mantan Ketua STIE-IBS periode 2004-2009.
4. Ibu Etika Karyani, SE., Ak, MSM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE-IBS.
5. Bapak Erric Wijaya, SE., ME, selaku pembimbing akademik yang selama ini banyak sekali memberi bimbingan, saran dan nasihat.

6. Bapak Drs. Atman Poerwokoesoemo, yang telah memberikan banyak saran dan pemahaman kepada penulis dalam menyusun skripsi.
7. Bapak Slamet Wiyono, Ak., MBA, yang telah banyak memberikan pemahaman dan dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
8. Mama dan Papa tercinta, terima kasih atas doa dan motivasi tiada henti yang diberikan selama penulis menyusun skripsi. Kakak tersayang, Dian, yang telah banyak membantu dalam berbagai hal. Mimih, Indra dan segenap keluarga besar yang telah meberikan doa.
9. Pihak Bank Muamalat Indonesia, Mbak Narti, Mas Priyo, dan Mas Afif yang dengan sabar membantu penulis dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan, dorongan, dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Bogor, 16 Agustus 2010

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dalam sujud Ku tiada henti aku sebut Nama Mu yaa Rabb
Yaa Samii'... Engkau yang Maha Mendengar segala pinta ku
Ketika aku membisu tak berdaya dan merintih dalam tangis ku
Engkau memberi bisikan pemahaman dan ketenangan pada ku
Yaa Bashiir ... Engkau yang Maha Melihat segala pengorbanan ku
Ketika aku terpojok dalam kesulitan dan air mata membasahi sajadah ku
Engkau memberi kelapangan jalan dan kemudahan untuk ku
Semua ini adalah untuk Mu Rabb wahai penolong ku yang Maha Sempurna
Tanpa henti aku berusaha karena ku percaya segala sesuatu adalah rencana Mu
Semua ini adalah untuk Mama, Papa, dan Kakak ku
Mereka adalah Anugerah terindah yang Engkau kirim untuk menemani langkah ku
Semua ini adalah untuk orang-orang pilihan terbaik yang Engkau beri dalam hidup ku
SubhanaAllah wal Hamdulillah ...*

*Terima kasih yaa Allah atas segala apa yang kau beri dalam perjalanan hidup ku ini
Terima kasih Mama, Papa, dan Kakak ku atas ketulusan kasih sayang dan doa kalian
Alhamdulillahirabbil'aalamiin ...*

-MILA-

ABSTRACT

Financing is one of the main tasks of the bank, which provides facilities for provision of funds to meet those needs arise. Financing with the principle of profit loss sharing is a type of financing that can realize the objectives of Islamic banking to pursue the creation of income distribution in society. The aims of this reaserch is to identify some variables that affect amount of profit loss sharing financing (musyarakah dan mudharabah) at Bank Muamalat Indonesia during the period 2005 to 2008. The variables are the Third Party Funds, a bonus of Bank Indonesia Certificates Sharia (SBIS), capital adequacy ratio and rate of credit conventional banks.

Research method which used is multiple linear regressions with distributed lag model, processed by Eviews 6. Regression results shows that four independent variables used may affect dependent variable as much as 63,22%, and the rest which is 37,77% explained by other variables that not being used in this research model.

Partially, the conclusion of this research is the Third Party Funds (positive) and rate of credit interest conventional banks (negative) significantly affects the amount of profit loss sharing financing.

Keywords : Profit loss sharing financing, third party funds, capital adequacy ratio, bonuses SBIS, rate of credit interest conventional banks



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmillah

NIM : 200612057

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

(Nurmillah)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Tanda Persetujuan Skripsi	
Tanda Persetujuan Penguji Komprehensif	
Tanda Pengesahan Skripsi	
Kata Pengantar	v
Halaman Persembahan.....	vii
<i>Abstract</i>	viii
Lembar Pernyataan Karya Sendiri.....	xi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Grafik	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Perumusan Masalah	14
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat penelitian	15
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II. LANDASAN TEORITIS	
2.1. Tinjauan Pustaka	17
2.1.1 Konsep Perbankan Syariah.....	17
2.1.2 Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah	18
2.1.3 Pembiayaan Perbankan Syariah.....	24

2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil	27
2.1.4.1 Pembiayaan Mudharabah.....	27
2.1.4.2 Pembiayaan Musyarakah	30
2.1.5 Distribusi Bagi Hasil.....	33
2.1.6 Laporan Keuangan Syariah.....	37
2.1.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)	38
2.1.7 Tingkat Kecukupan Modal (CAR)	40
2.1.8 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	42
2.1.9 Suku Bunga Kredit Bank Umum Konvensional.....	44
2.1.10 Penelitian-Penelitian Sebelumnya	46
2.2 Kerangka Pemikiran	50
2.3 Hipotesis	52
 BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pemilihan Obyek Penelitian.....	54
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	54
3.2.1 Data yang Dihimpun	54
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	55
3.3 Metode Analisis Data	57
3.3.1 Teknik Pengolahan Data	57
3.3.1.1 Uji Stasionaritas Data	57
3.3.1.2 Pemilihan Model Regresi	58
3.3.1.3 Uji Asumsi Klasik	60
3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis.....	64
3.4 Tahap-Tahap Penelitian	67
 BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	69
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.2.1 Analisis Masing-Masing Variabel	77
4.2.1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil.....	77

4.2.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga.....	78
4.2.1.3 Perkembangan Tingkat Kecukupan Modal	79
4.2.1.4 Perkembangan Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	80
4.2.1.5 Perkembangan Suku Bunga Kredit	81
4.2.2 Hasil Pengolahan Data.....	82
4.2.2.1 Uji Stasioanaritas Data	82
4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik	82
4.2.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda	87
4.2.2.3 Pengujian Hipotesis.....	89
4.2.3 Pembahasan.....	92
4.2.3.1 Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	92
4.2.3.2 Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	92
4.2.3.3 Pengaruh Bonus SBIS terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	93
4.2.3.4 Pengaruh Suku Bunga Kredit terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	94
4.2.3.5 Pengaruh DPK,CAR, Bonus SBIS, dan Suku Bunga Kredit terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. ..	95
4.2.4 Argumentasi Penelitian	96
4.2.5 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.....	99

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Komposisi DPK Perbankan Syariah.....	4
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	18
Tabel 2.2 Produk Penghimpunan Dana	23
Tabel 2.3 Produk Penyaluran Dana	23
Tabel 2.4 Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil	33
Tabel 2.5 Perbedaan Metode Distribusi Bagi Hasil	35
Tabel 2.6 Penelitian-penelitian Sebelumnya.....	49
Tabel 4.1 Kinerja Bank Muamalat Indonesia	76
Tabel 4.2 Hasil Uji Stasioneritas Data.....	82
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Nilai Residual (ρ).....	84
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	84
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	86
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	87
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Persamaan Model.....	88

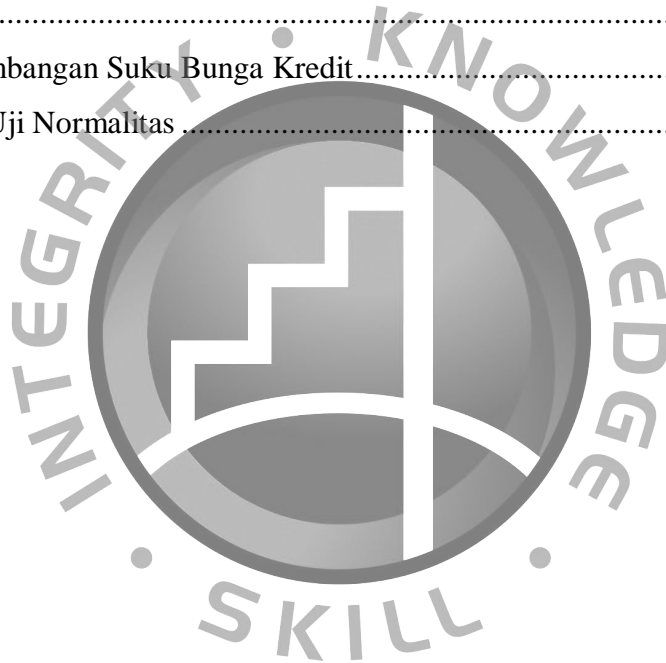
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema <i>Mudharabah</i>	28
Gambar 2.2 Skema <i>Musyarakah</i>	31
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	52
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Tahapan Penelitian	67
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	70



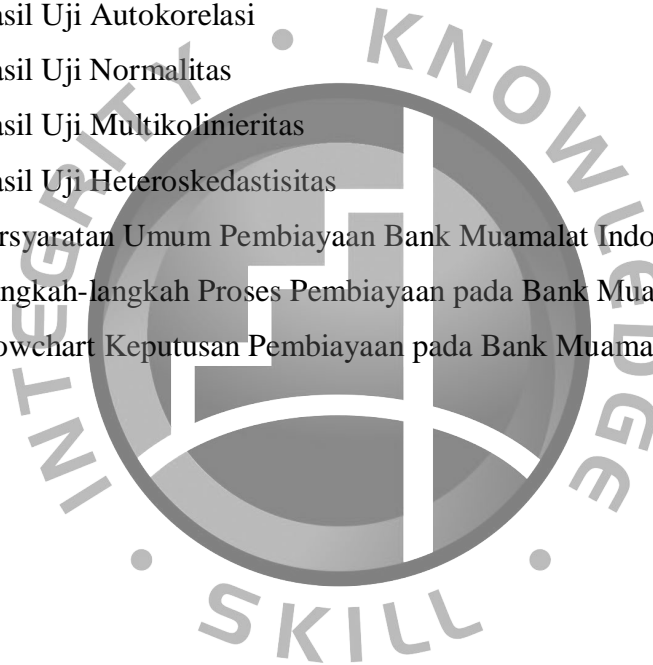
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah	3
Grafik 1.2 Pangsa Pembiayaan Perbankan Syariah.....	6
Grafik 4.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil	77
Grafik 4.2 Perkembangan DPK.....	78
Grafik 4.3 Perkembangan Tingkat Kecukupan Modal	79
Grafik 4.4 Perkembangan Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	80
Grafik 4.5 Perkembangan Suku Bunga Kredit.....	81
Grafik 4.6 Hasil Uji Normalitas	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Variabel-variabel Penelitian
- Lampiran 2 Data Variabel-variabel Penelitian setelah PBH dan DPK di Logaritma Natural (\ln)
- Lampiran 3 Uji Stasioneritas Data dengan Menggunakan Dickey Fuller
- Lampiran 4 Hasil Estimasi Nilai Residu (ρ)
- Lampiran 5 Hasil Estimasi Persamaan Model
- Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 10 Persyaratan Umum Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia
- Lampiran 11 Langkah-langkah Proses Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia
- Lampiran 12 Flowchart Keputusan Pembiayaan pada Bank Muamalat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kelompok dari Lembaga Keuangan adalah bank. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), yaitu menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Keberadaan bank umum di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan atau bank yang berdasarkan prinsip usaha syariah.

Seiring dengan keluarnya fatwa MUI No. 1 tanggal 24 Januari 2004 mengenai haramnya bunga bank, ikut mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Menurut UU No. 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam.

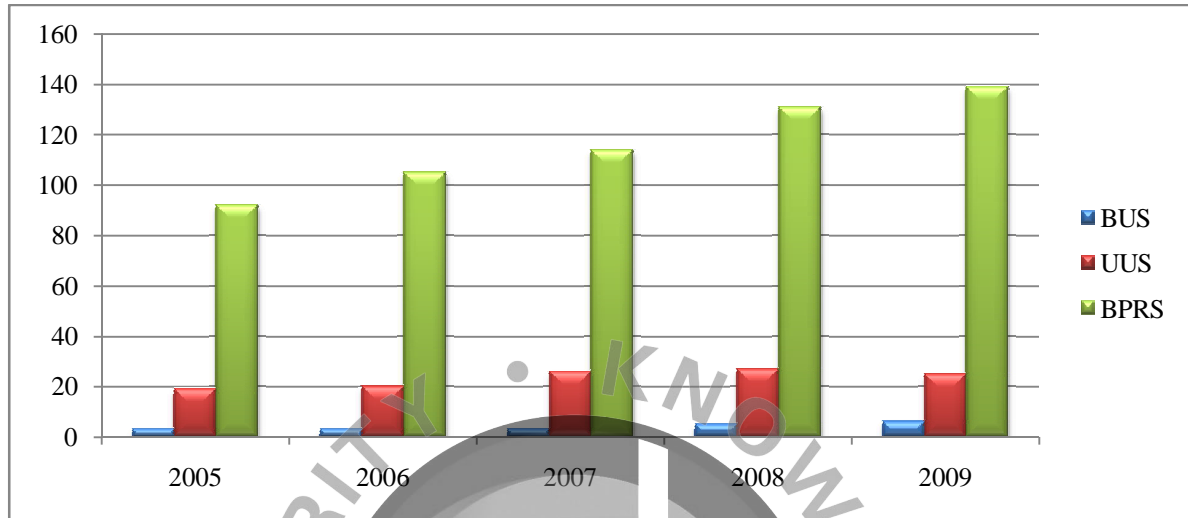
Dewasa ini, lahir UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan bank syariah ke depan akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai dengan UU tersebut antara lain: Pertama, Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat

dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7); Kedua, Penggabungan (*merger*) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2); Ketiga, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1). Selain itu, warga negara asing dan atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia dapat mendirikan dan atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1).

Keberadaan undang-undang tersebut telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah. Langkah yang ditempuh yaitu, dengan pemberian izin pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank konvensional atau mengkonversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Hal ini melahirkan sebuah sistem perbankan ganda atau yang lebih dikenal dengan "*dual banking system*", yang memungkinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan secara berdampingan memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Grafik 1.1

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2009, data diolah

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan kelembagaan perbankan syariah dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Pelopor perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Pada tahun 1999, Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Umum Syariah (BUS) bertambah menjadi tiga buah setelah pada bulan September 2004 Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) mulai beroperasi. Pada akhir tahun 2008 muncul Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) dan Bukopin Syariah. Sampai dengan tahun 2009, bank syariah tumbuh menjadi enam dengan berdirinya Bank Panin Syariah. Penambahan jumlah BUS diikuti pula dengan semakin banyaknya Unit Usaha Syariah (UUS) yang didirikan bank konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar luas di Indonesia.

Sebagai sumber pendanaan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pun turut bertambah. Setiap tahun total DPK dari masing-masing simpanan yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah lambat laun mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Tabel 1.1

Perkembangan Komposisi DPK Perbankan Syariah

(Miliar Rupiah)

KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA (DPK)	2005	2006	2007	2008
1. Giro Wadi'ah	2,048	3,416	3,750	4,238
2. Tabungan:	4,367	6,430	9,454	12,471
▪ Akad Wadi'ah	183	332	645	958
▪ Akad Mudharabah	4,184	6,098	8,809	11,513
3. Deposito Mudharabah	9,169	10,826	14,807	20,143
Total DPK	15,584	20,672	28,012	36,852

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2009

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) ini dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 DPK naik menjadi 20,672 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Begitu pula pada tahun 2008, pertumbuhan DPK mencapai 31,55% bila dibandingkan pada tahun 2007 dengan nominal sebesar 36,852 miliar rupiah.

Layaknya bank konvensional, bank syariah pun memiliki peran penting terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Fungsi perbankan sebagai penyalur dana dari pemilik dana untuk membiayai kegiatan ekonomi yang produktif memiliki pengaruh terhadap perkembangan sektor riil. Semakin tinggi intensitas intermediasi lembaga

keuangan terhadap penyaluran dana guna pengembangan sektor riil, maka akan berdampak kepada kinerja perekonomian yang akan semakin membaik.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak yang membutuhkan dana. Saat ini produk pembiayaan bank syariah dikategorikan berdasarkan empat prinsip, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip akad pelengkap dan prinsip bagi hasil. Bila dijabarkan, yaitu terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*.

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan ditentukan oleh sistem bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad. Dengan kata lain, besarnya keuntungan yang akan diperoleh ditentukan dari keuntungan usaha yang dibiayai. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

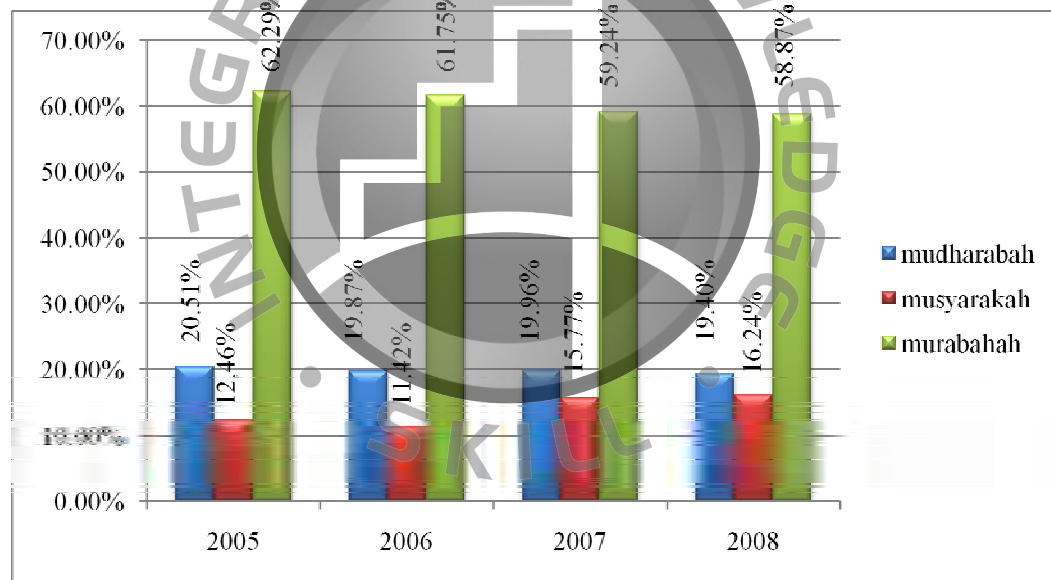
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dengan nisbah menurut kesepakatan di muka. Dalam hal ini, bank sebagai *shahibul maal* menginvestasikan dananya 100% ke dalam usaha yang akan dikelola oleh *mudharib*. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan dan bila terjadi kerugian hanya pemilik modal yang menanggungnya.

Musyarakah menurut PSAK No. 59 dapat didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pertumbuhan pembiayaan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, total dari pembiayaan yang disalurkan lebih banyak diwakili oleh *murabahah*. Seperti pada tahun 2005 dan 2006, pangsa pasar *murabahah* berada di atas 60% dari total pembiayaan. Pada tahun 2008, pangsa pasar *murabahah* sebesar 58,87%, sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* masing-masing sebesar 19,40% dan 16,24% .

Grafik 1.2

Pangsa Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2008, data diolah

Data menunjukkan dari total penyaluran dana yang diberikan oleh perbankan syariah, hampir sebagian besar didominasi oleh pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi jual beli, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga

beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama masa berlaku akad. Transaksi ini timbul atas permintaan nasabah dikarenakan tidak memiliki dana untuk bertransaksi langsung dengan pemilik barang (*supplier*).

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik karena sebenarnya diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih mendominasi. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan akan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dikelompokkan sebagai *Natural Uncertainty Contract* (NUC). NUC adalah kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian keuntungan. Ketidakpastian atas keuntungan dan pendapatan membuat risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank syariah lebih besar. Hal ini yang seringkali dijadikan alasan mengapa jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil, yaitu dengan prinsip jual beli. Padahal pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk meningkatkan kegiatan sektor riil. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Nuzul Ayni (2003), bahwa pembiayaan *mudharabah* lebih menguntungkan bagi nasabah dan bank. Untuk itu, perlu diteliti mengenai faktor apa saja yang sekiranya dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan dalam bank syariah merupakan fungsi penggunaan dana. Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan

efisien akan menambah perolehan tingkat pendapatan yang akan meningkatkan laba bersih (*net income*). Hal ini menegaskan bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Siregar (2004), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana, yaitu salah satunya adalah DPK. DPK dalam bank syariah merupakan dana yang berasal dari nasabah berupa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Melihat pentingnya DPK bagi penyaluran pembiayaan, berbagai macam kebijakan masing-masing bank pun dilakukan untuk menarik dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Dalam kenyataannya, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi perbankan itu sendiri seperti aspek permodalan. Modal bank yang cukup menjadi sangat penting karena modal bank dapat berfungsi untuk memperlancar operasional sebuah bank. Tingkat modal yang tinggi akan meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas penyaluran dana, sehingga bila bank memiliki modal yang besar maka kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan berupa laba semakin besar.

Sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan *surplus unit of fund* dengan *deficit unit of fund*, bank juga harus dengan baik menjaga modalnya. Modal merupakan aspek yang sangat penting karena hal ini berhubungan dengan seberapa besar kemampuan bank untuk menanggung risiko yang mungkin akan terjadi. Hal ini terkait dengan penyaluran pembiayaan yang mungkin memiliki risiko. Aspek pertama yang terkena dampak langsung pembiayaan bermasalah adalah modal, karena bank harus rela mengurangi modal yang dimiliki untuk menutupi kerugian yang terjadi. Menurut Warjiyo (2005),

perilaku penyaluran dana perbankan selain dipengaruhi oleh sumber dana pihak ketiga, juga dipengaruhi oleh tingkat permodalan yang diukur dengan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*).

Tingkat kecukupan modal pada perusahaan perbankan dapat diwakili dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, surat berharga, penyertaan, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri maupun diperoleh dari sumber dana di luar bank. Menurut Dendawijaya (2005), CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyanggah risiko dari aktiva bank. Jika terdapat peningkatan pembiayaan bermasalah, hal ini tentunya akan meningkatkan *bad debt cost*. Hal itu pada akhirnya akan semakin mengurangi modal yang dimiliki bank, sehingga dapat dikatakan jika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah maka semakin kecil nilai CAR yang dimiliki bank. Hal ini dapat berpotensi untuk menurunkan tingkat kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dalam manajemen penyaluran dana, bank juga harus peka terhadap kebijakan yang disediakan oleh *regulator*, yaitu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) berupa bonus Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI). Selanjutnya diperbaharui dengan berlakunya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Istilah SBIS ini secara resmi terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan piranti untuk pengendalian uang beredar serta sebagai sarana penitipan jangka pendek khususnya bagi bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Di saat tertentu, SBIS lebih menarik bagi bank syariah daripada menyalurkan dana bagi pembiayaan. Salah satu penyebab hal tersebut karena

faktor risiko yaitu 0%. Oleh karena itu, bonus yang diberikan atas penempatan dana pada SBIS ini merupakan sumber dana bagi bank. Tingkat bonus SBIS ini diduga mempengaruhi jumlah pembiayaan khususnya dalam penelitian ini pembiayaan bagi hasil.

Di samping itu, mengingat bahwa sebagian atau seluruh nasabah bank syariah sebelumnya merupakan nasabah bank konvensional, atau mungkin nasabah keduanya, maka memungkinkan mereka mempertimbangkan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank umum konvensional. Kemungkinan mereka menganggap faktor harga dana sebagai faktor penting dalam pengajuan pembiayaan. Menurut Chapra (2000) suku bunga kredit yang tinggi merupakan penghambat utama investasi dalam sistem kapitalis. Pembayaran bunga dapat mencapai sepertiga dari keuntungan yang diperoleh. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Namun pada kenyataannya, bank syariah disinyalir harus melihat suku bunga kredit bank umum konvensional pada saat menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat lebih memilih pinjaman dengan tingkat pengembalian yang tidak terlalu tinggi.

Sebagai *pioneer* bank umum syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam bidang perbankan. BMI membuktikan eksistensinya, khususnya ketika terjadi krisis moneter tahun 1998 yang diwarnai oleh tingkat bunga yang tinggi karena inflasi, namun bank ini terbebas dari *negative spread*. Hal tersebut disebabkan karena bank syariah tidak berbasis pada bunga.

Bila diamati, total aset Bank Muamalat Indonesia (BMI), total aset terus mengalami peningkatan. Laporan keuangan tahun 2008 menunjukkan total aset BMI sebesar Rp. 12,69 triliun rupiah. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp. 10,56

triliun rupiah. Sejak awal berdirinya sampai sekarang BMI semakin tumbuh dan berkembang baik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, timbul pertanyaan mengapa jumlah pembiayaan *murabahah* selalu lebih besar dari pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, perlu diteliti seberapa besar pengaruh dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dan tingkat kecukupan modal (CAR) yang selalu terjaga dengan baik terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Demikian juga, pemberian bonus atas penempatan kelebihan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan suku bunga kredit yang mungkin mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat Indonesia (BMI). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya berpengaruh dan akan meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil. Meninjau laporan neraca bulanan, jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil BMI per 31 Desember 2008 adalah 4,98 triliun rupiah. Total pertumbuhan pembiayaan bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat hampir 100% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,69 triliun rupiah.

Dengan memperhatikan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Kecukupan Modal, Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Suku Bunga Kredit Bank Umum Konvensional terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia (periode 2005 - 2008).**

1.2 Identifikasi Masalah

Saat ini pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah lebih banyak kepada pembiayaan dengan prinsip jual beli yang sebenarnya bukan merupakan karakteristik bank syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) yang sesuai dengan tujuan layanan bank syariah yang sesungguhnya, jumlahnya justru lebih sedikit jika dibandingkan dengan *murabahah*.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama yang lahir berdasarkan prinsip syariah juga menawarkan produk pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, qardh dan ijarah*. Pada portofolio pembiayaan BMI juga terlihat didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Padahal sebagai bank syariah seharusnya pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil komposisinya lebih besar. Hal ini dikarenakan, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang dapat mewujudkan tujuan perbankan syariah untuk mengupayakan terciptanya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti faktor-faktor yang sekiranya akan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh BMI.

Dana merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam kegiatan operasional bank. Tanpa dana, bank tidak dapat menjalankan fungsi intermediasinya. Jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah merupakan kemampuan bank dalam mengelola sumber dana. Selain itu sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank juga penting untuk selalu menjaga kecukupan modalnya. Hal ini terkait dengan penyaluran dana yang diberikan untuk membiayai usaha yang mungkin menimbulkan risiko kerugian. Terjadinya kerugian dari pembiayaan bermasalah merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bank

sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena itu, modal yang merupakan aspek penting untuk meng-*cover* risiko kerugian akibat pembiayaan perlu dijaga. Tingkat kecukupan modal dinyatakan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) . Bertolak dari hal tersebut, perlu untuk mempertimbangkan kebijakan yang disediakan oleh regulator, yaitu penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan bank syariah. Pengaruh lainnya adalah perlu untuk meneliti suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank umum konvensional yang mungkin akan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. Kecendrungan perubahan tingkat suku bunga perlu dicermati, dalam hal ini profil dari nasabah bank syariah yang masih sensitif terhadap pergerakan suku bunga.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- 2) Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan jumlah dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh BMI.
- 3) Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data per satu bulan dimulai dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2008.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok permasalahan penelitian ini:

- 1) Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia?
- 2) Apakah tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia?
- 3) Apakah bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia?
- 4) Apakah suku bunga kredit bank umum konvensional mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia?
- 5) Apakah DPK, tingkat kecukupan modal, bonus SBIS dan suku bunga bank umum konvensional secara bersama-sama mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengukur seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Untuk mengukur seberapa besar pengaruh tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.
- 3) Untuk mengukur seberapa besar pengaruh bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

- 4) Untuk mengukur seberapa besar pengaruh suku bunga kredit bank umum konvensional terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.
- 5) Untuk mengukur seberapa besar pengaruh DPK, tingkat kecukupan modal, bonus SBIS dan suku bunga bank umum konvensional terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pihak Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai teridentifikasinya beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, dapat dijadikan preferensi bagi dalam menentukan strategi dan manajemen yang baik, khususnya dalam pembiayaan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktisi serta referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah :

BAB I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: *Pertama*, tinjauan pustaka yang berisi tentang uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Kedua*, kerangka pemikiran memuat gambar atau bagan serta berisi penjelasan variabel terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. *Ketiga*, hipotesis yang merupakan jawaban atau pemecahan sementara atas masalah yang dipersoalkan dalam penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan secara detail tentang metode penelitian yang digunakan. Penjelasan dimulai dari pemilihan obyek penelitian, data yang akan dihimpun, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik. Kalau ternyata hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian baik atau tidak sesuai dengan teori ataupun harapan umum yang berlaku, maka peneliti harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut dapat terjadi.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari semua hal yang diuraikan pada bab sebelumnya serta saran sebagai bahan alternatif pemecahan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya agar dapat bermanfaat di kemudian hari bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau *interest-free banking*. Istilah *Islamic* sendiri muncul manakala bank tersebut lahir dari sekelompok muslim yang ingin menerapkan sebuah sistem menurut aturan syariah Islam. Hal yang menjadi fokus utama dalam aturan syariah Islam adalah pelanggaran praktek riba, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Definisi bank syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah yang dijelaskan pada pasal 13 butir 1 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank untuk pihak lain.

Bank Islam atau bank syariah dikembangkan atas dasar tidak adanya pemisahan urusan dunia dengan agama. Dasar tersebut mengharuskan konsep syariah perlu diterapkan sebagai

dasar kehidupan untuk mencapai keridhaan dari Allah. Oleh sebab itu, apa yang dijalankan dalam praktek perbankan yang merupakan aspek *muamalah* (transaksi syariah) harus sesuai dengan syariah Islam yaitu Alquran dan hadist atau sunah Rasul.

Menurut Antonio (2001), dalam beberapa hal bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa kesamaan. Terutama dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Disamping itu, terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasinya bercampur, yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa	Memakai perangkat bunga (sebagai acuan investasi)
3	<i>Profit dan falah oriented</i> (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan sejenis

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*

2.1.2 Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bank syariah mempunyai lima konsep dasar operasional, di antaranya :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini, yaitu:

- a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yaitu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yaitu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberitahu kepada pembeli, harga produk yang ia beli dan tingkat keuntungan tambahannya. *Al- murabahah* ini memberi keuntungan kepada bank syariah yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dan harga beli dari nasabah.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli

atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

c. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dengan penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat, infaq dan shadaqah*.

Prinsip-prinsip operasional yang telah diuraikan tersebut diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini diterapkan pada berbagai penawaran produk penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Tabel 2.2

Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk/Jasa	Prinsip Syariah
1	Giro	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
2	Tabungan	<i>Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah</i>
3	Deposito	<i>Mudharabah Mutlaqah</i>
4	Simpanan khusus	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

Selain menawarkan berbagai macam produk penghimpunan dana tersebut, bank syariah juga menawarkan berberapa produk sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 2.3

Produk Penyaluran Dana

No.	Produk/Jasa	Prinsip Syariah
1	Dana Tabungan	<i>Qardh</i>
2	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
3	Sewa Beli	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
4	Pembiayaan Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah</i>
5	Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah dan Musyarakah</i>
6	Pembiayaan sektor Pertanian	<i>Salam</i>
7	Pembiayaan ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah</i>
8	Anjak piurang	<i>Hawalah</i>
9	Letter of credit L/C	<i>Wakalah</i>
10	Garansi bank	<i>Kafalah</i>
11	Inkaso, transfer	<i>Wakalah dan Hawalah</i>
12	Pinjaman social	<i>Qardhul Hasan</i>
13	Surat berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
14	Safe deposit box	<i>Wadiah Amanah</i>
15	Jual beli valas	<i>Sharf</i>
16	Gadai	<i>Rahn</i>

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

2. 1.3 Pembiayaan Perbankan Syariah

Pada prinsipnya, dana yang dihimpun oleh bank syariah harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, maka bank wajib mengalokasikan dana yang telah dihimpunnya. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mendukung berdirinya aktivitas investasi dan bisnis-bisnis lainnya sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Sama seperti bisnis lainnya, bank syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya.

Pembiayaan atau dalam istilah bank konvensional disebut dengan kredit menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dapat diartikan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu, pembiayaan adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil.”

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, menurut Algood (2003) ada lima segi *religijs*, yang berkedudukan kuat dalam literatur yang harus diterapkan dalam perilaku investasi, yaitu:

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*).
2. Pengenalan pajak *religijs* atau pemberian sedekah dan zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
5. Penyediaan takaful (asuransi Islam)

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezekin-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak hanya memberikan rezeki kepada kaum muslimin saja tetapi juga kepada siapa saja yang bekerja keras (Antonio, 2001).

Manusia dapat bekerja atau melakukan kegiatan usahanya. Untuk memulai usaha maka diperlukan modal. Tidak semua orang memiliki modal sendiri pada saat akan memulai usahanya. Oleh sebab itu, beberapa orang harus meminjam modal dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam ini tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan dan mempererat persaudaraan.

Saat ini banyak bermunculan bank syariah yang berusaha menjembatani pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal dengan tetap memperhatikan syariah dalam operasionalnya. Menurut Antonio (2001), dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat karena dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial bukan komersil. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu orang itu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjaman. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba dan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh sebab itu, dalam perbankan syariah tidak disebut kredit tapi pembiayaan.

Menurut Antonio (2001), berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Antonio (2001) menambahkan bahwa menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaan suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambah modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan berjangka waktu yang cukup lama. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah pada umumnya menggunakan skema *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya. Adapun pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari usaha nasabah. Pembiayaan bagi hasil dinilai memenuhi prinsip kesetaraan, keadilan, dan kejujuran. Konsep pembiayaan bagi hasil menerapkan adanya pembagian risiko atas usaha yang dibiayai antara bank dengan nasabah. Pembiayaan bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

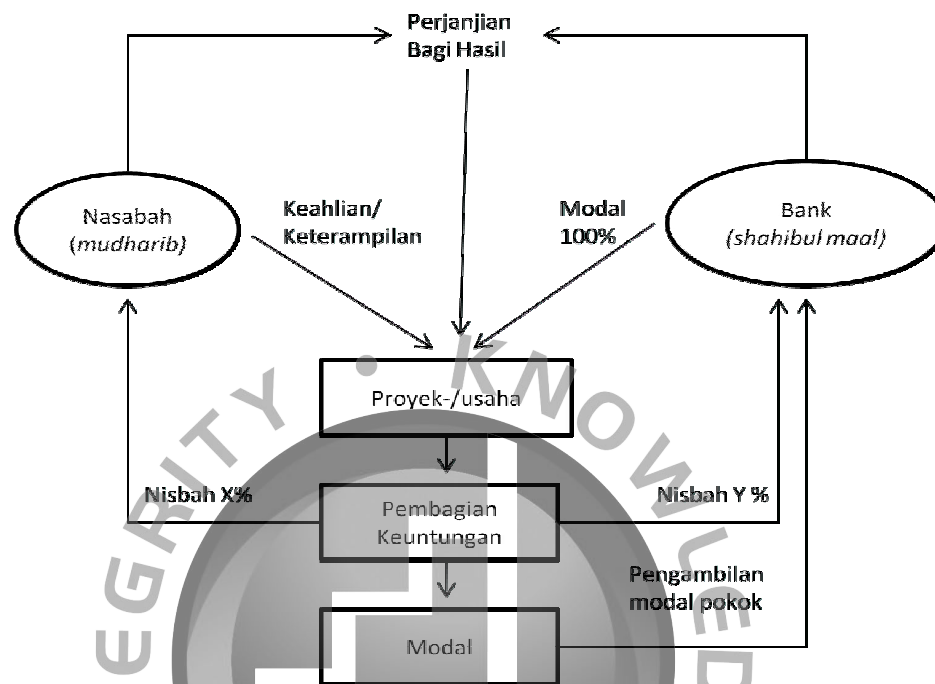
2.1.4.1 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, definisi *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Gambar 2. 1

Skema Mudharabah



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

Landasan syariah *mudharabah* ini lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun landasan hukum syariah *mudharabah* yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, yaitu :

1. Landasan hukum Alquran dalam surat Al-Muzzamil ayat 20 yang berbunyi,

“...dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

Dalam ayat tersebut, terdapat kata *yadhribun* yang sama dengan kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al-Hadis, dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (Hr. Ibnu majah).

Berdasarkan ayat Alquran dan hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk selalu berusaha di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah. Usaha yang dilakukan dapat dijalankan seorang diri atau bersama-sama seperti *mudharabah*.

Menurut Antonio (2001), secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Pada *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu ataupun tempat usaha.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Terdapat beberapa kemungkinan risiko dari pembiayaan *mudharabah* terutama terkait dengan *moral hazard* dan *adverse selection* karena adanya *asimetric information*.

Disamping risiko yang mungkin dihadapi dari pembiayaan *mudharabah*, terdapat pula beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

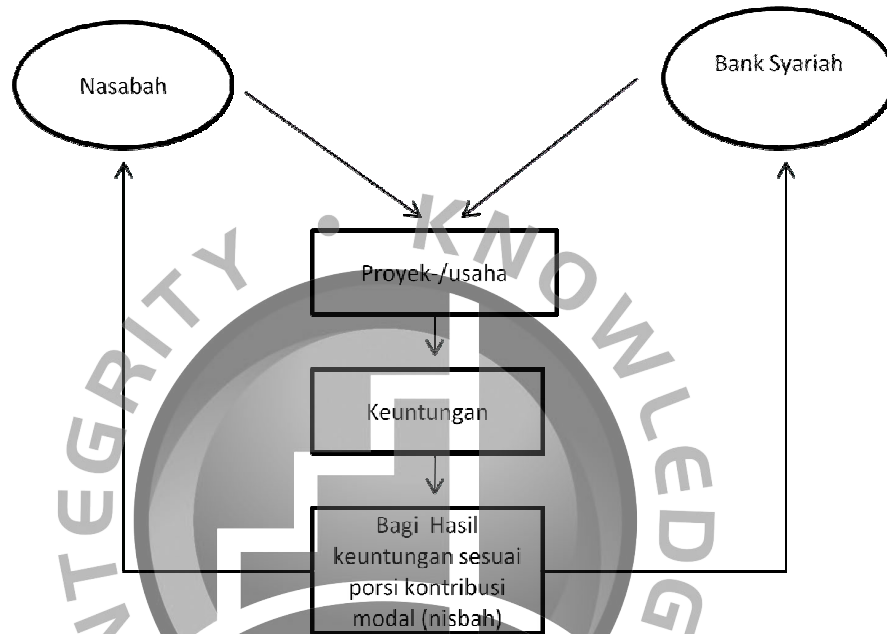
2.1.4.2 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti pencampuran. Sebelum diuraikan tentang *musyarakah*, maka perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis *syirkah*. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, definisi *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas, aset setara kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. PSAK 106 ini pun menjelaskan mengenai mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik

mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sementara itu, mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.

Gambar 2.2

Skema Musyarakah



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*

Musyarakah dalam perbankan syariah diaplikasikan untuk modal kerja atau investasi. Dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Setelah usaha tersebut selesai dijalankan, nasabah akan mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada bank syariah.

Transaksi dengan akad *musyarakah* memiliki landasan syariah yang kuat. Landasan syariah yang membolehkan pelaksanaan transaksi dengan akad *musyarakah*, yaitu:

1. Landasan hukum Alquran

- a. Dalam surat An-Nisaa' ayat 12 yang berbunyi :

".....maka mereka berserikat pada sepertiga..."

- b. Dalam surat Shaad ayat 24 yang berbunyi :

"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..."

2. Hadist Riwayat Abu Dawud

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, " Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (H.R.Abu Dawud no 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim).

Resiko yang biasanya terjadi pada transaksi *musyarakah* adalah nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tertulis dalam kontrak (*side streaming*). Selain *side streaming*, pengkhianatan yang mungkin adalah nasabah dengan sengaja menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai.

Pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* memiliki parameter penentuan kolektibilitas yang tidak hanya terkait dengan kelancaran pembayaran angsuran saja, namun ada beberapa parameter yang menyebabkan pembiayaan tersebut dianggap sehat (Sesuai lampiran SE BI 8/22/Dpbs tanggal 18 Oktober 2006), yaitu :

- a. Prospek Usaha Nasabah

1. Potensi pertumbuhan usaha
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan

3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 4. Dukungan dari group atau afiliasi
 5. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup
- b. Kinerja (*Performance*) Nasabah, terdiri dari:
1. Perolehan laba
 2. Struktur permodalan
 3. Likuiditas dan Arus kas
 4. Sensitivitas terhadap resiko pasar
- c. Kemampuan Membayar Angsuran Pokok dan pembayaran bagi hasil
- Bank harus benar-benar *maintenance* tidak hanya dari segi kelancaran pembayaran angsuran dan bagi hasil saja namun juga membuat parameter-parameter risiko untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin timbul.

2.1.5 Distribusi Bagi Hasil

Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dengan sistem bagi hasil oleh bank syariah, yaitu:

Tabel 2.4

Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah

		pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> (tetap)	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besar bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank	Keberhasilan proyek atau usaha jadi perhatian bersama yaitu, lembaga dan nasabah
Berapa besarnya	Pasti (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum dalam Islam	Berlawanan dengan Alquran surat Luqman ayat 34	Sesuai dengan Alquran surat Luqman ayat 34

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*

Pendapatan bagi hasil diperoleh dari pembiayaan bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, yaitu porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Sistem perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah menggunakan nisbah. Nisbah menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002) adalah “Rasio/perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab, aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan dua metode distribusi bagi hasil, yaitu *revenue sharing* dan *profit-loss sharing (profit sharing)*. *Profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan pendapatan tersebut. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Tabel 2.5

Perbedaan Metode Distribusi Bagi Hasil

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Revenue Sharing</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber : PSAK 105 (2007)

Menurut tim pengembangan perbankan syariah (2003), aplikasi perbankan syariah pada umumnya dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana.

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, yaitu bagi hasil dihitung dari pendapatan neto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Antonio yang menyatakan bahwa "*Mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*". Sementara itu, untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah (IBI, 2003:256-266) dapat mengikuti tatacara dan ketentuan sebagai berikut :

1. Menghitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
3. Menghitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Memperhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
7. Mendistribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

2.1.6 Laporan Keuangan Bank Syariah

Selayaknya organisasi, bank syariah juga harus menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansinya. Laporan keuangan merupakan proses dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Menurut PSAK No. 101 tahun 2009, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Selain itu, untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan syariah, antara lain meliputi :

- 1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan arus kas
 - d. Laporan perubahan ekuitas
- 2) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - b. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggungjawab khusus entitas syariah tersebut.

Menurut Wiyono (2006), yang membedakan dengan neraca jenis organisasi lain terletak pada dana *syirkah* temporer. Dana *syirkah* temporer bukan kewajiban dan juga bukan ekuitas. Dana *syirkah* temporer adalah dana pihak ketiga yang dititipkan/diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola secara bebas sesuai syariah, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Maka persamaan akuntansi dalam neraca adalah sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Dana Syirkah Temporer} + \text{Ekuitas}$$

2.1.7 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau

aktiva lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali.

Dana yang dihimpun terdiri dari dana pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (dana dari bank dan bukan bank), dan dana dari pihak ketiga (DPK) yaitu nasabah. Menurut Wibowo (2007) salah satu faktor pengambilan keputusan dalam hal penyaluran dana, dapat dilihat dari besarnya DPK. DPK merupakan dana yang dititipkan pada bank. DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2000).

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat disebut juga dengan istilah *funding*. Manajemen dana bank syariah adalah upaya bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana dari aktivitas *funding* untuk disalurkan ke aktivitas *financing*. Agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya pada bank syariah, maka pihak bank syariah menawarkan berbagai macam produk berbasis simpanan. Pada umumnya jenis-jenis simpanan yang ada di bank syariah antara lain:

a. Simpanan Giro

Simpanan giro di bank syariah lebih dikenal dengan giro *wadiah*. Giro merupakan simpanan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro. Bagi setiap pemegang giro, akan diberikan bonus yang dikenal dengan jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank syariah yang bersangkutan. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena itulah bonus yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari simpanan lainnya. Beberapa ulama memandang giro sebagai kepercayaan,

yaitu dana diterima oleh bank sebagai simpanan untuk keamanan (*wadiah yad dhamanah*).

b. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan pada bank syariah terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, diputuskan bahwa tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga tidak dibenarkan secara syariah, sedangkan tabungan berprinsip *mudharabah* dan *wadiah* dibenarkan secara syariah. Bagi setiap pemegang tabungan *mudharabah*, akan diberikan bagi hasil yang merupakan jasa atas tabungannya. Bagi hasil berasal dari pendapatan yang diterima oleh bank syariah atas penggunaan dana tersebut. Nasabah akan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi, untuk tabungan *wadiah*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

c. Simpanan Deposito

Deposito pada bank syariah dikenal dengan deposito *mudharabah*. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun sesuai dengan jangka waktu tersebut. Nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito akan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.8 Tingkat Kecukupan Modal (CAR)

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, yang berpotensi menghasilkan keuntungan, juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu,

modal juga digunakan untuk menjaga kemungkinan risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari pihak ketiga. Menurut Siamat (2005), terdapat beberapa fungsi dari modal bank, antara lain memberikan perlindungan kepada nasabah, mencegah terjadinya kejatuhan bank, memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris, memenuhi ketentuan permodalan minimum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menutupi kerugian aktiva produktif bank, sebagai indikator kekayaan bank, dan meningkatkan efisiensi operasional bank.

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Tingkat kecukupan modal bank disebut juga dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam menyediakan modal minimum yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut Mulyono (1996), faktor-faktor internal yang mempengaruhi penyaluran dana, antara lain sifat usaha dan segmen pasar bank itu sendiri, *financial position* (*capital adequacy ratio*), kemampuan dalam menghimpun dana, dan kemampuan manajemen bank. Menurut Warjiyo (2005), kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume penyaluran dana yang diberikan oleh perbankan. Mengingat modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam menjalankan usahanya, maka diharapkan pihak pengelola bank dapat selalu menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas yang dapat

ditampung oleh permodalan bank, serta melakukan pemantauan terhadap kondisi permodalan banknya secara simultan.

Tinggi rendahnya tingkat kecukupan modal suatu bank dipengaruhi dua faktor, yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (*primary and secondary capital*). ATMR adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup (Susilo, 2000). Menurut SK Dir. BI Nomor 26/20/KEP/DIR/29 Mei 1993 (dalam Suseno dan Piter Abdullah, 2003), di Indonesia jumlah modal minimum yang harus ada pada bank diatur oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 8% dari ATMR. CAR diharapkan berkorelasi positif dengan penawaran kredit. Rumus untuk menentukan tingkat kecukupan modal, dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.1.9 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Pada tahun 2008 dilakukan penyempurnaan kerangka operasi moneter syariah. Penyempurnaan tersebut diawali pada April 2008 dengan introduksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai pengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang telah digunakan sejak tahun 2000. Sehingga semua istilah SWBI dalam ketentuan Bank Indonesia yang masih berlaku, harus dibaca sebagai SBIS. Pertimbangan penggantian adalah

peningkatan efektivitas kegiatan penyerapan likuiditas perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan operasi moneter Bank Indonesia.

Usulan penerbitan SBIS diawali dari adanya keluhan bank-bank syariah. Perbankan syariah menilai *return* penempatan dana pada SWBI lebih rendah dibanding dengan penempatan dana bank konvensional pada SBI. Untuk itu, mereka meminta kepada BI agar difasilitasi dengan instrument yang memiliki *return* sebanding dengan SBI atau minimal tidak jauh perbedaannya. Sementara SWBI memiliki *return* cukup kecil.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrument operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan dari SWBI adalah penggunaan akad, dari *wadiah* menjadi *ju'alah*. Secara terminologi fiqih, *ju'alah* berarti suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan/upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Secara formal, penggantian tersebut dilakukan dengan penerbitan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Maret 2008. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- c. Diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*).
- d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Bagi bank syariah, kelebihan dana likuiditas dapat disalurkan ke BI melalui SBIS. Hal ini menjadi salah satu jalan agar kelebihan dana tersebut dapat digunakan secara efisien. Keberadaan SBIS akan menjadi pilihan instrument investasi bagi bank syariah, ketika masih diperlukannya waktu dalam menganalisis pembiayaan sebelum disalurkan pada pembiayaan yang *prudent* dan berkualitas.

2.1.10 Suku Bunga Kredit Bank Umum Konvensional

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga:

- a. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.
- b. Persaingan, dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.
- c. Kebijakan pemerintah, dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang.

Adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum akan mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan dalam perekonomian Indonesia. Bank-bank umum konvensional dalam operasionalnya sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Sedangkan dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga, yang ada adalah prinsip bagi hasil antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya.

Menurut Chapra (2000), suku bunga kredit rata-rata merupakan salah satu indikator bergulir atau tidaknya suatu investasi ataupun usaha yang produktif. Hal ini dikarenakan, dengan tingkat suku bunga yang tinggi akan menghambat laju investasi yang produktif. Sebaliknya, dengan suku bunga yang terlalu rendah akan mendorong investasi yang tidak produktif (konsumsi yang tinggi).

Suku bunga kredit yang tinggi mengakibatkan tingkat investasi menjadi menurun karena tingginya bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Hal ini membuat keuntungan yang diterima oleh peminjam digunakan untuk membayar bunga. Suku bunga kredit yang tinggi juga membuat para calon peminjam berpikir panjang untuk meminjam uang ke bank. Sebab ini pula yang mengakibatkan bank kesulitan dalam menyalurkan dananya.

Walaupun demikian, dengan adanya kenaikan suku bunga kredit bank umum konvensional baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap bank syariah. Hal ini dikarenakan, menurut Firdaus (2004), perilaku konsumen yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen emosional yang melakukan transaksi karena keyakinan dan ideologi yang dianutnya, sedangkan konsumen rasional yang bertransaksi karena pemikiran rasional dalam mencari keuntungan yang lebih tinggi. Sebagian besar

kelompok ini lebih memilih pinjaman dengan tingkat pengembalian yang tidak terlalu tinggi tanpa memperdulikan apakah memakai bunga atau tidak.

Pada dasarnya bank syariah tidak menggunakan suku bunga kredit dalam melakukan pembiayaan bagi hasil. Ketika suku bunga kredit naik, nasabah kemungkinan akan memilih bank syariah sebagai alternatif untuk memperoleh dana. Mereka akan cenderung meminjam dana di bank syariah dengan sistem bagi hasil daripada harus meminjam di bank umum dengan membayar bunga.

2.1.11 Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asy'ari (2004) yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan di Perbankan Syariah". Faktor-faktor tersebut antara lain suku bunga rata-rata, bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan jumlah uang beredar (Mo). Asy'ari menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Kesimpulan yang ditarik oleh Asy'ari dari pengujian atas empat variabel bebas terhadap hanya DPK yang benar-benar signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan perbankan syariah.

Nurhayati (2004), melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia". Ia meneliti dengan menggunakan variabel dana pihak ketiga (DPK), bonus Sertifikat Wadiah bank Indonesia (SWBI), dan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Metode yang digunakan dengan metode analisis regresi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa SWBI berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. DPK berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penyaluran dana, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana.

Ghafur (2004) melakukan penelitian untuk mengetahui peranan rasio keuangan bank terhadap keputusan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Variabel yang digunakan adalah total pembiayaan, *loan to assets ratio* (LAR), *rate of return on loan ratio*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *asset utilization ratio*, total dana pihak ketiga, *loan to deposit ratio* (LDR). Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dan model *autoregressive distributed lag* (ADL). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas (rasio keuangan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu pembiayaan baik secara simultan maupun parsial.

Ibrahim (2005) yang secara khusus ingin mengukur peranan faktor harga terhadap minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pengujian dilakukan terhadap tiga variabel bebas, yaitu harga produk pembiayaan *mudharabah* (nisbah bagi hasil), hasil produk pesaing (suku bunga kredit bank konvensional), dan produk domestik bruto perbankan/lembaga keuangan. Hasil pengujian dengan metode regresi linier berganda memberikan kesimpulan bahwa keputusan nasabah untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMI sangat dipengaruhi oleh besarnya porsi nisbah bagi hasil. Dikaitkan dengan telah tersegmentasinya pasar pembiayaan syariah dengan konvensional, berkurangnya permintaan pembiayaan *mudharabah* tidak berarti nasabah BMI beralih menjadi debitur bank konvensional. Namun, tetap menjadi nasabah BMI dengan beralih menjadi nasabah non *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan Anggraini (2005) mengenai penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Variabel-variabel bebas yang diduga mempengaruhi adalah

profit, jumlah dana pihak ketiga (DPK), dan *non performing financing* (NPF). Metode analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi persamaan simultan. Hasil kesimpulannya bahwa hanya *profit* yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hubungan DPK dan jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah positif. Hal ini berarti menunjukkan semakin banyak DPK maka akan semakin besar jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dapat diberikan oleh bank syariah.

Donna (2006) yang melakukan penelitian dengan judul “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Model yang digunakan adalah model *distributed lag*. Pada sisi permintaan, hasil regresi menunjukkan bahwa *mudharabah* secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil beserta *lag*-nya (negatif) dan ekspektasi profit beserta *lag*-nya (positif). Pada sisi penawaran, hasil regresi menunjukkan bahwa *mudharabah* secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (positif), dana pihak ketiga (positif), dan modal per aset (positif).

Hilmi (2006), melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel harga dan non harga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM). Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* dengan kredit modal kerja bersifat substitusi atau bukan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel terdiri dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), suku bunga kredit bank konvensional, dan dana pihak ketiga (DPK). Hasil menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh besarnya DPK. Tersegmentasinya nasabah pembiayaan bank syariah dengan debitur bank konvensional terbukti. Hal ini dapat dilihat dari korelasi parsial antara

variabel bunga kredit dengan pembiayaan *mudharabah* yang menunjukkan hubungan negatif. Dengan kata lain, kredit modal kerja di bank konvensional bukan merupakan substitusi dari pembiayaan *mudharabah*. Sementara itu, peningkatan *return* SWBI mempengaruhi bank syariah untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk pembiayaan.

Widiastuti (2008), melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh pendapatan bagi hasil dan suku bunga kredit modal kerja terhadap pembiayaan bagi hasil. Penelitian yang dilakukan pada bank XYZ dengan menggunakan metode regresi linier. Adapun hasil yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa pendapatan bagi hasil dan suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Tabel 2.6
Penelitian-penelitian Sebelumnya

Peneliti (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen	Metodologi
Asy'ari (2004)	Pembiayaan	Suku bunga, SWBI, DPK, dan Mo	Metode regresi linier berganda
Nurhayati (2004)	Penyaluran Dana	DPK, SWBI, dan NPF	Metode regresi linier berganda
Ghafur (2004)	Pembiayaan	LAR, CAR, LDR, <i>asset utilization ratio</i> , dan total dana pihak ketiga	Analisis regresi berganda dengan model <i>autoregressive distributed lag</i>
Ibrahim (2005)	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Nisbah bagi hasil, suku bunga kredit bank konvensional, produk domestik bruto	Metode regresi linier berganda
Anggraini (2005)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	<i>Profit</i> , jumlah DPK, dan NPF	Analisis regresi persamaan simultan
Donna (2006)	Permintaan dan Penawaran <i>Mudharabah</i>	Tingkat bagi hasil, ekspektasi profit, dana pihak ketiga, dan modal per aset	Metode regresi linier berganda dengan model <i>distributed lag</i>

Hilmi (2006)	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	SWBI, suku bunga kredit bank konvensional, dan DPK	Metode regresi linier berganda
Widiastuti (2008)	Pembiayaan bagi hasil	Pendapatan bagi hasil dan suku bunga kredit modal kerja	Metode regresi linier berganda

2.2 Kerangka Pemikiran

Idealnya, selain dituntut untuk beroperasi menurut aturan syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga diharapkan mampu meningkatkan proporsi pembiayaan bagi hasil. Hal ini akan memberikan efek terhadap sektor riil yang luar biasa. Untuk merealisasikan hal tersebut, BMI harus mengetahui apa saja hal-hal yang sekiranya dapat mempengaruhi secara dominan/signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Penelitian ini mengidentifikasikan beberapa hal yang mungkin dapat mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil. Adapun variabel-variabel bebas yang hendak diuji adalah jumlah dana pihak ketiga (DPK), tingkat kecukupan modal (CAR), bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan suku bunga bank umum konvensional. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan dari beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam prakteknya ternyata penyaluran dana dipengaruhi beberapa faktor. Besarnya dana yang akan disalurkan tergantung pada sumber-sumber dana yang dimiliki bank. Sumber dana utama yang dimiliki bank adalah dana pihak ketiga. Besar kecilnya penyaluran dana yang dilakukan dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Jumlah pembiayaan merupakan kemampuan bank mengatur sumber dana yang berhasil dihimpunnya, dalam hal ini dana pihak ketiga (DPK). Komposisi dari sumber dana

yang dihimpun oleh bank, memperlihatkan adanya hubungan antara sumber dana dengan pembiayaan.

Karakteristik dari akad pembiayaan bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* sangat rentan terhadap risiko. Risiko pembiayaan terjadi ketika *mudharib* dengan berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan. Oleh sebab itu, bank syariah harus memiliki modal yang cukup besar untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kecukupan modal, yaitu *capital adequacy ratio* (CAR). CAR merupakan salah satu alat yang digunakan bank dalam melakukan rencana pembiayaan. Pihak bank perlu menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas yang dapat ditampung oleh modal yang dimiliki.

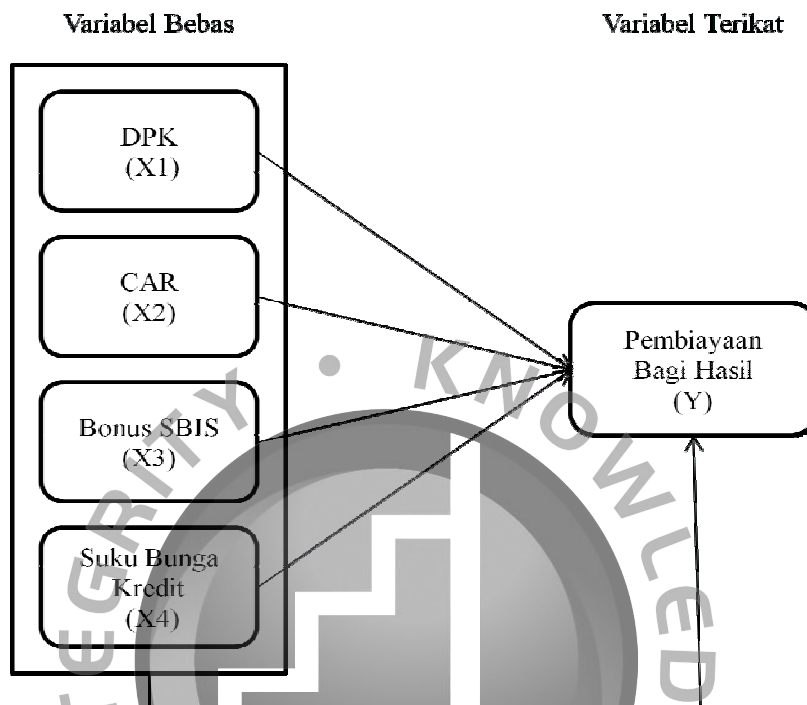
Sertifikat Bank Indonesia (SBIS) merupakan alat kebijakan moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Tujuan SBIS ini adalah memberikan solusi bagi bank syariah yang kelebihan atas likuiditas dana. Pada saat tertentu, SBIS menarik bagi bank syariah salah satunya karena faktor risiko yang sama sekali tidak ada. Selain itu, bonus yang diberikan atas penempatan dana pada SBIS juga menjadi pertimbangan bank syariah

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satunya adalah persaingan. Suku bunga kredit merupakan harga produk yang ditawarkan oleh bank umum konvensional. Walaupun bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga kredit, tapi suku bunga ini diduga memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah.

Dari penjelasan singkat di atas, hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan yang logis antara dua variabel atau lebih yang disajikan dalam bentuk pernyataan penelitian. Dugaan dari hubungan antar variabel didasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dibangun sebelumnya (Uma Sekaran, 2000). Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis, yaitu :

1. Hipotesis untuk Dana Pihak Ketiga (DPK)

H_0 : DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : DPK berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

2. Hipotesis untuk tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*)

H_0 : CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : CAR berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

3. Hipotesis untuk bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

H_0 : SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : SBIS berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

4. Hipotesis untuk suku bunga kredit bank umum konvensional

H_0 : Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : Bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

5. Hipotesis secara bersama untuk semua variabel

H_0 : DPK, CAR, SBIS, dan bunga secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : DPK, CAR, SBIS dan bunga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pemilihan BMI sebagai obyek penelitian karena BMI merupakan bank umum syariah yang pertama berdiri sejak tahun 1991 yang sampai saat ini eksistensinya tetap baik di tengah perkembangan perbankan syariah. Selain itu, diharapkan BMI telah memiliki banyak data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun periode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2008.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Data yang dihimpun

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Pengertian data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna (Kuncoro, 2003). Data sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh

dari laporan keuangan, laporan kolektibilitas pembiayaan serta *financial highlight* Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diperoleh langsung dari Muamalat Institute. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) melalui situs www.bi.go.id. Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer. Oleh karena itu, data sekunder tidak dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian kita.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data *time series*. Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode penelitian. Pengumpulan data dimulai dari bulan Januari 2005 hingga Desember 2008, sehingga terdapat 48 sampel. Alasan pengambilan sampel dari periode tersebut dikarenakan karena adanya keterbatasan data dan waktu.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, baik yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masalah penelitian, dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro dan Bambang 2002:152). Alasan digunakan metode ini adalah pelaksanaan wawancara

bersifat bebas tetapi mengarah pada masalah pokok serta dapat menjaga hubungan baik antara pewawancara dengan narasumber.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian guna memperoleh pengetahuan secara teoritis dari berbagai literatur, catatan, dokumen, artikel-artikel, buku-buku ilmiah dan materi perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai catatan seperti data laporan keuangan serta berbagai data pendukung lainnya. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dasar dalam pembahasan masalah. Adapun sumber data berasal dari :

1. Data jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil yang merupakan penjumlahan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berasal dari laporan kolektibilitas pembiayaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada setiap bulan dalam bentuk satuan rupiah.
2. Data dana pihak ketiga (DPK) berasal dari laporan keuangan BMI pada setiap bulan dalam bentuk satuan rupiah.
3. Data tingkat kecukupan modal (CAR) berasal dari *financial highlight* BMI pada setiap bulan dalam bentuk persentase (%).
4. Data bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berasal dari laporan publikasi Bank Indonesia (BI), yaitu dalam statistik perbankan syariah setiap bulan dalam bentuk persentase (%).
5. Data suku bunga kredit bank umum konvensional kategori investasi, berasal dari laporan publikasi Bank Indonesia (BI), yaitu dalam Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) pada setiap bulan dalam bentuk persentase (%).

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Teknik Pengolahan Data

Untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah dibuat pada penelitian ini digunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Eviews 6.

3.3.1.1 Uji Stasioneritas Data

Langkah pertama mengolah data dalam penelitian ini adalah melakukan uji akar unit (*unit root test*). *Unit Root test* merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah data bersifat stasioner atau non stasioner. Suatu data dikatakan stasioner jika tidak terdapat perubahan yang sistematis dalam *mean* dan varian pada berbagai lag. Jika data tidak stasioner, maka dapat menghasilkan bentuk model yang *spurious* (semu). Regresi semu adalah regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik padahal kenyataannya tidak sebesar regresi yang dihasilkan sehingga dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebelum memproses suatu data diperlukan pengecekan stasioneritas data terlebih dahulu (*Eviews User's Guide*, 2004). Pengujian stasioneritas data pada penelitian ini menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF). Proses uji stasioneritas dengan metode ADF akan menghasilkan deret seri data yang ada. Jika data telah stasioner pada tingkat level, maka dapat dilakukan perhitungan terhadap data tersebut. Akan tetapi, jika uji ADF menunjukkan data tidak stasioner, maka perlu dilakukan transformasi data menggunakan metode *differencing stationary process* (DSP). Proses ini dilakukan dengan *first difference* dan berlanjut sampai *second difference*. Pilihan *first difference* pada uji *unit root* menunjukkan bahwa data yang ada telah ditransformasikan dengan metode DSP. Prosedur untuk

menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan *critical value* (CV) pada *level confidence* tertentu. Hipotesis pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

H_0 : data tidak stasioner

H_a : data stasioner

Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari CV pada berbagai *level confidence*, maka menolak H_0 sehingga data telah stasioner. Sebaliknya data tidak stasioner jika nilai absolut statistik ADF lebih kecil dari CV (Aliman, 2000).

3.3.1.2 Pemilihan Model Regresi

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi linier berganda. Pada prinsipnya, model regresi linier merupakan suatu metode yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk mengestimasi model tersebut digunakan penerapan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square*), yang biasa disingkat dengan OLS. Metode tersebut digunakan untuk mencari penyimpangan atau *error* yang minimum. Jadi, akan diperoleh suatu fungsi regresi yang terestimasi dekat sekali dengan model regresi sesungguhnya. Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$. Penggunaan model analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini apakah variabel bebas, yaitu Dana Pihak Ketiga atau DPK (X_1), tingkat kecukupan modal atau CAR (X_2), bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS (X_3), dan suku bunga

kredit (X_4) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat Indonesia (Y). Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel terikatnya, baik secara parsial maupun simultan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$PBH = b_0 + b_1DPK + b_2CAR + b_3SBIS + b_4Bunga + e$$

Satuan data PBH dan DPK adalah dalam nominal rupiah. Sementara itu, satuan data SBSI, CAR, dan suku bunga kredit adalah presentase, maka perlu ditransformasi ke dalam logaritma natural (Ln). Transformasi ke dalam logaritma natural untuk memperkecil nilai koefisien yang dihasilkan karena adanya perbedaan satuan antar variabel yang sangat besar. Dengan demikian, model yang digunakan menjadi:

$$LNPBH = b_0 + b_1LNDPK + b_2CAR + b_3SBIS + b_4Bunga + e$$

Pembiayaan tidak serta merta terjadi pada saat diajukan tetapi perbankan syariah memerlukan waktu untuk menyetujui pembiayaan tersebut. Dalam hal ini jumlah pembiayaan bagi hasil pada periode ke t dipengaruhi oleh variabel bebas periode sebelumnya (t-1), maka persamaan di atas harus disesuaikan menjadi persamaan dengan lag 1. Oleh karena itu, digunakan model dinamis (model yang melibatkan perubahan dari waktu ke waktu). Secara teknis, model dinamis yang digunakan adalah model keterlambatan terdistribusi (*Distributed Lag Models*) karena efek perubahan satu unit dalam nilai variabel penjelas terpencah atau terdistribusi pada sejumlah periode waktu. Model *distributed lag* menunjukkan bahwa nilai Y_t dipengaruhi oleh nilai X waktu sebelumnya (X_{t-1}). Dalam penelitian ini, yaitu terjadi kelambanan pada variabel terikat. Kelambanan terjadi karena alasan psikologis, teknis, dan institusi (Gujarati, 1995). Sehingga, persamaannya menjadi :

$$\text{LNPBH}_t = b_0 + b_1 \text{LNDPK}_{t-1} + b_2 \text{CAR}_{t-1} + b_3 \text{SBIS}_{t-1} + b_4 \text{Bunga}_{t-1} + e$$

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. LNPBH didefinisikan sebagai pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari penjumlahan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI).
2. LNDPK didefinisikan sebagai total dana pihak ketiga yang dikelola BMI. DPK merupakan penjumlahan dari giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.
3. CAR didefinisikan sebagai tingkat kecukupan modal. Rasio ini diperoleh dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BMI dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki bank dengan aktiva tertimbang menurut resiko.
4. SBIS didefinisikan sebagai tingkat bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi setiap bank syariah yang menyimpan likuiditas dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah .
5. Bunga didefinisikan sebagai tingkat suku bunga kredit bank umum konvensional.

3.3.1.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh kesimpulan apakah model yang digunakan memiliki kelayakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat maka model harus melalui beberapa pengujian. Model dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi klasik, diantaranya :

a. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series* karena kondisi sekarang (periode t) dipengaruhi waktu lalu (periode $t-1$). Dalam data *time series* sering ditemukan adanya korelasi karena begitu dekatnya hubungan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena data *time series* terkait dengan kebijakan atau kejadian yang saling berkaitan mempengaruhi data yang dikumpul bertahun-tahun yang beruntutan. Dengan adanya autokorelasi dengan dugaan parameter OLS masih *unbiased* dan *consistent* tetapi *standar error* dari dugaan parameter regresi adalah bias, sehingga mengakibatkan uji statistik menjadi tidak tepat dan interval kepercayaan menjadi bias (*biased confidence intervals*).

Salah satu caranya untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan metode *Langrange Multiplier* (LM test). Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu :

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_a : Ada autokorelasi

Pengambilan kesimpulan bisa dilakukan dengan melihat apakah nilai probabilitas dari obs^*R -squared lebih kecil atau lebih besar daripada $\alpha = 5\%$ atau 0.05. Jika nilai obs^*R -squared lebih besar daripada α , maka terima H_0 . Artinya tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang diperoleh. Dan jika sebaliknya, maka simpulkan terdapat autokorelasi yang signifikan pada model regresi tersebut.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Dengan asumsi OLS estimator atau penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya data adalah Jargue-Bera test atau J-B test. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan *chisquare probability distribution*. Dapat disimpulkan, yaitu dengan hipotesis:

H_0 : data berdistribusi normal

H_a : data tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka tidak dapat menolak H_0 artinya data berdistribusi normal.

c. Uji Multikolinieritas

Satu dari asumsi model regresi linier klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinieritas di antara variabel yang menjelaskan yang termasuk dalam model. Menurut Gujarati (2006), multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Selain

itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat *correlations matrix*. Multikolinieritas dideteksi dengan melihat koefisien antar variabel bebas. Menurut Widarjono (2007), jika korelasinya kurang dari 0,85 (*rule of thumb* 0,85) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas. Tetapi jika nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,85 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas dalam model tersebut. Multikolinieritas yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran terhadap asumsi OLS adalah *exact multicollinearity* (multikolinieritas sempurna). Jika dalam suatu model terdapat multikolinieritas yang sempurna maka akan diperoleh nilai R^2 yang tinggi tetapi tidak ada koefisien variabel dugaan yang signifikan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variabel dari residu regresi yang digunakan dalam penelitian tidak homoskedastis atau dengan kata lain tidak konstan. Data yang diambil dari pengamatan satu ke yang lain tidak memiliki residu yang konstan atau tetap. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residu terhadap variabel bebasnya (Gujarati, 2003).

Jika variabel bebas signifikan secara statistik, mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu :

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas

H_a : ada heteroskedastisitas

Pengambilan kesimpulan bisa dilakukan dengan melihat apakah nilai probabilitas dari $obs \cdot R$ -squared lebih kecil atau lebih besar daripada $\alpha = 5\%$ atau 0.05. Jika nilai $obs \cdot R$ -squared lebih besar daripada α , maka terima H_0 , artinya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang diperoleh. Jika sebaliknya, maka bisa disimpulkan adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

3.3.2 Teknik Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi (*Goodness of fit*), dilakukan uji secara statistik. Pengujian statistik yang dilakukan dengan melihat koefisien determinasi, yang dinotasikan dengan *R square* (R^2). R^2 tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Artinya, nilai tersebut mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Namun, untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan R^2 yang sudah disesuaikan atau tertulis *adjusted R²* karena disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang dipergunakan dalam penelitian. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. R^2 yang semakin mendekati satu berarti semakin besar variasi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Ketentuannya yaitu :

- a. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), Artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali.
- b. Bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain $R^2 = 1$, maka semua titik-titik pengamatan berada tepat pada garis regresi

b. Uji F

Uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersama-sama (simultan). Artinya, pengujian ini untuk mendeteksi signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Adapun tahap-tahap uji F adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif :

H_0 : Tidak ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen ($X_1 = X_2 = X_3 = 0$).

H_a : Ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen ($X_1 \neq X_2 \neq X_3 \neq 0$).

b. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan F tabel *degree of freedom* ($df=(n-1, n-k)$:

i. Jika nilai F hitung $>$ nilai F tabel, maka H_0 ditolak (ada pengaruh simultan yang signifikan)

ii. Jika nilai F hitung \leq nilai F tabel, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh).

c. Atau dengan tingkat signifikansi 5% :

i. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.

ii. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima.

c. Uji t

Pengujian t statistik dimaksudkan untuk meneliti pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nilai t hitung yang tersedia dalam program Eviews akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah

masing-masing variabel mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil atau tidak.

Tahap-tahap uji t adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif :

$H_0 : X_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara statistik antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_1 : X_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan secara statistik antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Menentukan tingkat signifikansi α sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k dalam menentukan t tabel.

c. Menentukan kriteria :

1. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak (*reject* H_0), artinya variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
2. Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka *do not reject* H_0 , artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

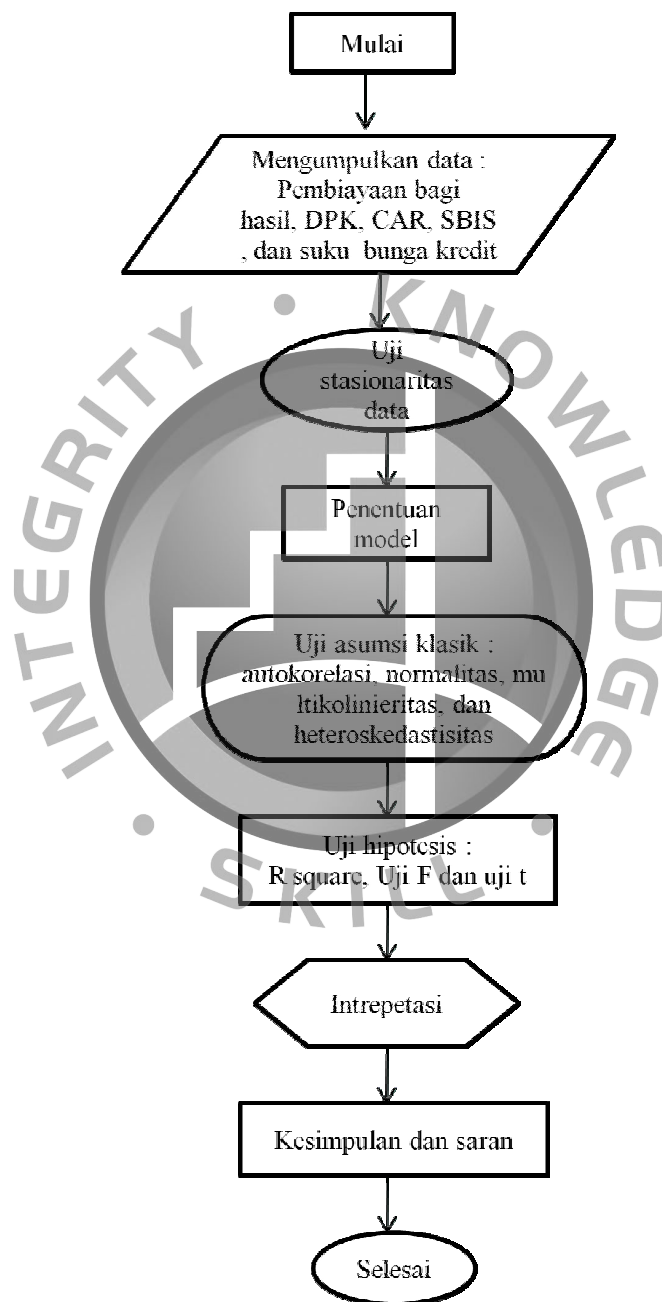
d. Atau dengan tingkat signifikansi 5% :

- i. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.
- ii. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima.

3.4 Tahap-tahap Penelitian

Gambar 3.1

Flowchart Tahapan Penelitian



Flowchart tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data jumlah pembiayaan bagi hasil, DPK, CAR, SBIS, dan suku bunga kredit dari Januari 2005 sampai Desember 2008.
2. Melakukan uji stasioanaritas data.
3. Menentukan model yang tepat dan sesuai.
4. Memilih metode apa yang cocok untuk dipakai.
5. Melakukan uji asumsi klasik, berupa uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.
6. Melakukan pengujian hipotesis, yaitu koefisien determinasi (R^2), *F-test* dan *t-test*.
7. Mengintrepetasikan model, apakah model tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.
8. Membuat kesimpulan dan saran.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1991. Pendirian bank ini diprakarsai oleh tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan, BMI mendapat dukungan dari sekelompok pengusaha, cendekiawan muslim dan masyarakat dengan adanya komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat senilai Rp 106 miliar. Dengan modal awal tersebut, BMI memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992.

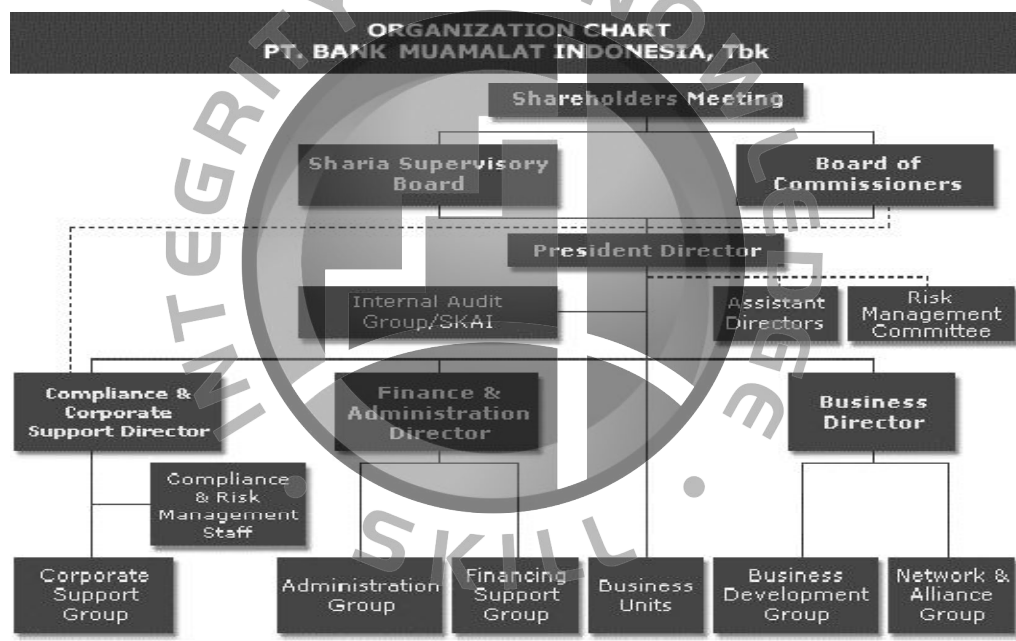
Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. BMI pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, dalam kurun waktu

antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi BMI. Dalam kurun waktu tersebut, BMI berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba. Keberhasilan ini ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia



Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Adapun visi dan misi Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

Visi : Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

Misi : Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

Dalam perkembangannya, BMI terus melanjutkan tradisi menjadi pionir perbankan syariah di Indonesia. BMI aktif terlibat dalam proses pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). BMI juga mendirikan Muamalat Institute sebagai lembaga pendidikan sumber daya insan (SDI). Inovasi lainnya adalah pendirian Gerai Muamalat, yang merupakan terobosan di bidang penyediaan outlet permanen bagi layanan perbankan syariah di Indonesia. Gerai Muamalat ini merupakan aliansi strategi dengan PT. Pos Indonesia. Kerja keras BMI pun menciptakan berbagai reputasi yang baik, terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diraih diantaranya adalah :

1. MUI AWARDS 2004 : Penghargaan sebagai Bank terbaik yang menjalankan operasional secara syariah.
2. KLIFF AWARD 2004 : *The Most Outstanding Performance by an Islamic Bank*.
3. Majalah MODAL : Peringkat 1 kategori *The Top of Mind* , hasil penelitian *Karim Business Consultants* (KBC).
4. SUPERBRANDS : Satu dari 101 perusahaan yang memiliki brand/merek yang kuat (*Superbrands*) di Indonesia.
5. Majalah SWA : Edisi No. 10/XVI/16-29 Mei 2000, peringkat ke 2 Terbaik dalam Tingkat Kepuasan Nasabah. Edisi 18 April 2001, peringkat ke 6 sebagai bank paling dikenal masyarakat serta sebagai bank paling aman di atas bank asing dan bank swasta lain.

6. Indonesian Best Brand 2005 "Top Five" : Edisi No. 16/XXI/14-17 Agustus 2005, *The Celestial Management*. Edisi 24 Oktober 2005, *Innovation in Customer Mode of Entry*.
7. InfoBank Award 2002 Rating peringkat ke 17 sebagai bank dengan predikat sangat bagus. InfoBank Award 2003 Rating peringkat ke 7 sebagai bank dengan predikat sangat bagus untuk kategori bank beraset Rp 1 triliun - Rp 20 triliun. InfoBank Award 2004 sebagai bank dengan predikat sangat bagus.
8. Majalah Pilars sebagai sepuluh besar bank dengan Predikat Teraman versi Majalah Pilars Bisnis Edisi No. 10/VII, 12 Mei 2003.
9. International Islamic Bank Award (IIBA) sebagai *The Most Efficiency Bank The Most Convenient Musholla*.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMI memiliki berbagai produk yang telah dipasarkan. Produk-produk tersebut meliputi produk pendanaan (*funding*), pembiayaan (*financing*), dan jasa-jasa pelayanan lainnya.

Produk pendanaan (*funding*) :

- 1) Tabungan Ummat, yaitu sarana investasi murni sesuai syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.
- 2) Tabungan Ummat Junior, yaitu tabungan yang khusus ditujukan bagi para pelajar.
- 3) Kartu Shar-E, kini tidak ada lagi hambatan bagi nasabah untuk bertransaksi dengan bank syariah. BMI tetap membantu untuk berinvestasi murni sesuai syariah dengan cara yang mudah dan murah, di manapun nasabah berada. Shar-E adalah investasi syariah yang

dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000.- dan dapat diperoleh di Kantor Pos *Online* di seluruh Indonesia.

- 4) Tabungan Haji Arafah, yaitu jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah kehendaki. Manfaatkan keunggulan Tabungan Haji Arafah untuk mempersiapkan rencana Anda ke Baitullah secara terencana.
- 5) Giro *wadiah*, yaitu Giro *wadiah* BMI dalam mata uang rupiah maupun valas, pribadi ataupun perusahaan, ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha nasabah. Dengan sistem *wadiah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- 6) Deposito *mudharabah*, yaitu pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.
- 7) DPLK Muamalat, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Produk Pembiayaan (*financing*):

- 1) Piutang *murabahah*, yaitu fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).

- 2) Piutang *ishtisna'*, yaitu fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek / barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah.
- 3) *Rahn* (Gadai Syariah), bekerjasama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). *Rahn* (Gadai Syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan. Penggunaan *Rahn* diantaranya adalah Untuk usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya sesuai syariah. Layanan Gadai Syariah ini dapat diperoleh pada seluruh Counter Syariah PT. Pegadaian.
- 4) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola nasabah dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.
- 5) Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan

porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

Dalam rangka meminimalisasikan resiko yang kemungkinan timbul akibat pembiayaan, BMI pun memiliki beberapa strategi, yaitu :

1. Hasil penjualan/pendapatan dari bisnis yang dibiayai seluruhnya harus melalui mekanisme mutasi rekening di bank sehingga dapat dengan mudah dikontrol bersama dengan nasabah tanpa perlu klarifikasi lagi untuk memastikan kebenaran data penjualan/pendapatan.
2. Menggunakan objek bagi hasilnya adalah *Revenue Sharing*.
3. Didalam bisnis yang dibiayai terdapat suatu media/alat yang mencatat realisasi penjualan/pendapatan yang keamanannya terjamin, sehingga juga dapat mempermudah klarifikasi data realisasi penjualan tersebut.
4. Fasilitas *mudharabah* ini lebih ditujukan diberikan kepada nasabah yang sudah eksisting dengan *past performance* yang tergolong *prime customer* dan telah teruji bukan kepada *new customer*.
5. Bank lebih memilih untuk memberikan pembiayaan kepada suatu bidang usaha dengan kondisi sedang dalam tahap pertumbuhan, bukan dalam tahap penurunan usaha sehingga jika dilihat dari sisi *product life cycle*, produk dari bidang usaha tersebut harus sedang dalam masa pertumbuhan juga.
6. Bidang usaha yang akan diberikan pembiayaan harus telah diyakini benar dampak risikonya (pilih usaha yang paling manageable risikonya).

7. Memberikan *covenant*, yaitu jika realisasi objek bagi hasil tidak sesuai dengan proyeksi, maka bank berhak ikut melakukan pengelolaan usaha minimal aspek keuangannya.
8. Memonitor dengan baik keteraturan dan ketepatan waktu nasabah dalam memberikan laporan sebagai ukuran bank dalam menilai aspek *character* nasabah.

Perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga dapat dilihat dari kondisi keuangannya. Sampai akhir 2008, total aset BMI sebesar 12,69 triliun rupiah. Total aset ini terus meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, pertumbuhan total aset BMI sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar 50,4%. Begitu pun dari jumlah penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat. Hal ini seiring dengan jumlah penghimpunan dana dari nasabah (DPK) yang semakin bertambah pula. Berikut adalah rangkuman kinerja BMI selama periode 2005 sampai dengan 2008:

Tabel 4.1
Kinerja Bank Muamalat Indonesia

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2005	2006	2007	2008
Total Aset	7,427,047	8,370,595	10,569,078	12,699,056
Total Pembiayaan	5,887,736	6,628,087	8,618,046	10,479,751
Dana Pihak Ketiga	5,750,227	6,837,431	8,691,328	10,073,955
Laba/Rugi Kumulatif :				
Operasional	159,183	174,771	221,368	308,177
Tahun Berjalan	156,254	161,473	212,038	301,055
Rasio Keuangan :				
CAR	16.33%	14.38%	10.69%	10.56%
FDR	89.08%	83.60%	99.16%	104.03%
BOPO	81.59%	84.69%	82.75%	78.85%
NPF	2.80%	4.84%	1.33%	3.80%
NIM	6.29%	6.10%	7.60%	7.12%
ROA	2.53%	2.10%	2.27%	2.60%
ROE	18.10%	21.99%	23.24%	33.71%

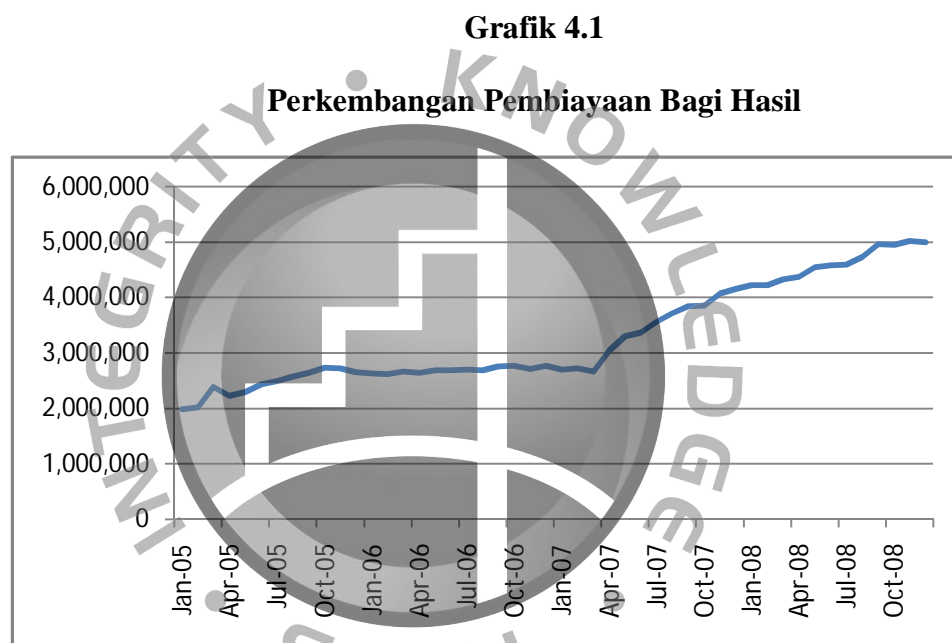
Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI), data diolah

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Masing-masing Variabel

4.2.1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil

Jumlah pembiayaan bagi hasil, yaitu yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* selalu mengalami peningkatan. Perkembangan pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



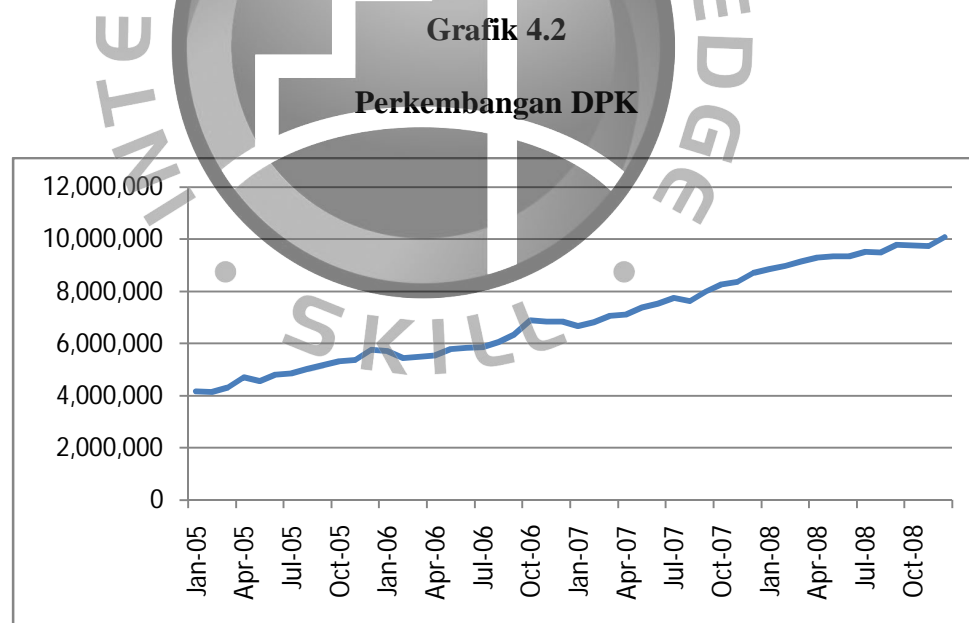
Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI), data diolah

Pada grafik 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bagi hasil terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah yang cukup signifikan mulai terjadi pada tahun 2007. Pada tahun 2007, jumlah pembiayaan bagi hasil mengalami pertumbuhan sebesar 50.16%. Data menunjukkan jumlah pembiayaan bagi hasil pada akhir tahun 2006 adalah 2,764,475 juta rupiah. Pada akhir tahun 2007, jumlahnya mencapai 4,151,281 juta rupiah. Peningkatan jumlah pembiayaan terus bertambah sampai akhir tahun 2008, yaitu sebesar 5,011,264 juta rupiah. Peningkatan ini bisa dikarenakan oleh karena beberapa faktor. Salah satu faktornya,

seperti kesadaran masyarakat bahwa pembiayaan bagi hasil ini dapat membantu untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu, dari sisi bank yang semakin menambah proporsi pembiayaan bagi hasil karena pendapatan bagi hasil yang diterima jumlahnya lebih besar.

4.2.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar bagi bank. Dana yang berasal dari masyarakat ini berupa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan. Semakin banyak DPK yang dihimpun bank, maka semakin banyak dana yang disalurkan untuk pembiayaan termasuk pembiayaan bagi hasil. Perkembangan DPK Bank Muamalat Indonesia (BMI) diperlihatkan pada gambar berikut ini:



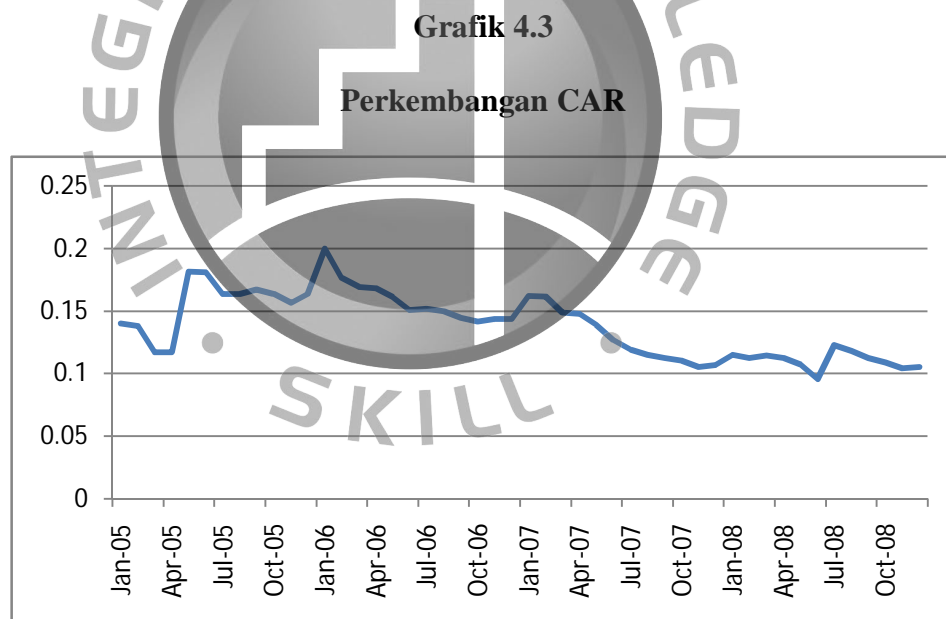
Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI), data diolah

Pada grafik di atas terlihat bahwa jumlah DPK yang dihimpun oleh BMI terus mengalami peningkatan. Sampai akhir tahun 2008, pertumbuhan DPK sebesar 75.19% dari

tahun 2005. Data menunjukkan bahwa jumlah DPK BMI sampai dengan akhir tahun 2008 adalah sebesar 10,073,955 juta rupiah.

4.2.1.3 Perkembangan Tingkat Kecukupan Modal

Tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan aspek penting yang perlu dijaga dengan baik. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu portfolio aset yang paling penting dan juga beresiko. Oleh sebab itu, CAR yang semakin besar akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan CAR yang tinggi, kondisi bank untuk meng-*cover* risiko kerugian akibat pembiayaan bagi hasil akan semakin kecil. Perkembangan CAR Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah sebagai berikut :



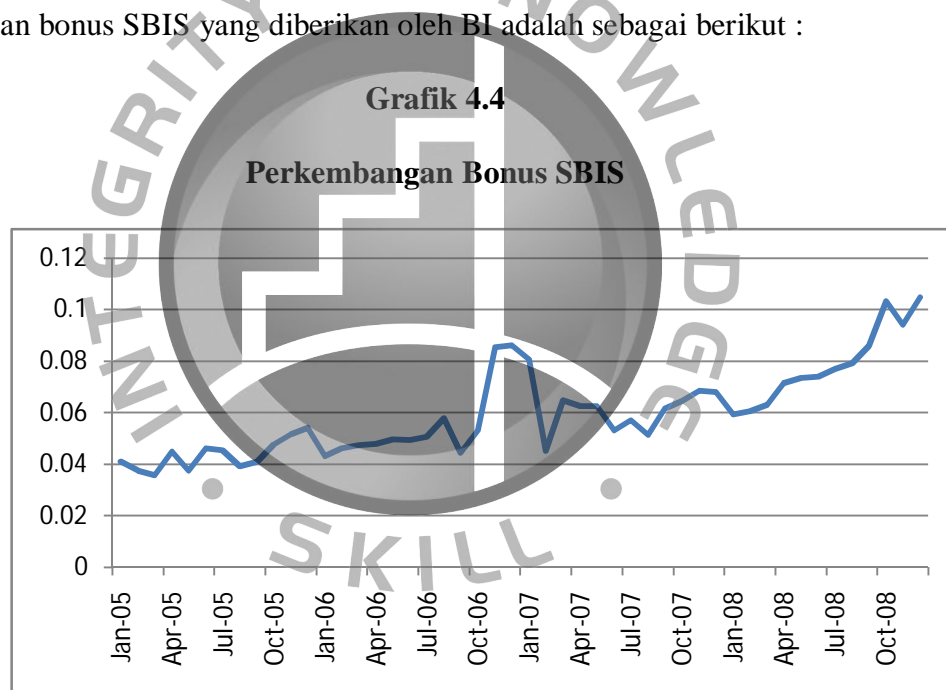
Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI), data diolah

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa besarnya CAR BMI berfluktuasi, namun selalu berada di atas 8% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Nilai fluktuatif ini disebabkan karena pertumbuhan sumber dana masyarakat yang harus disalurkan secara optimal dalam

bentuk aktiva produktif. Sehingga hal itu menambah jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah kecukupan modal BMI. Selama periode 2005 sampai dengan 2008, CAR BMI terbesar ditunjukkan pada Januari 2006, yaitu sebesar 19.96%.

4.2.1.4 Perkembangan Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Variabel bonus SBIS merupakan pendapatan yang diterima bank syariah sebagai kompensasi dari kelebihan likuiditas dana yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Perkembangan bonus SBIS yang diberikan oleh BI adalah sebagai berikut :



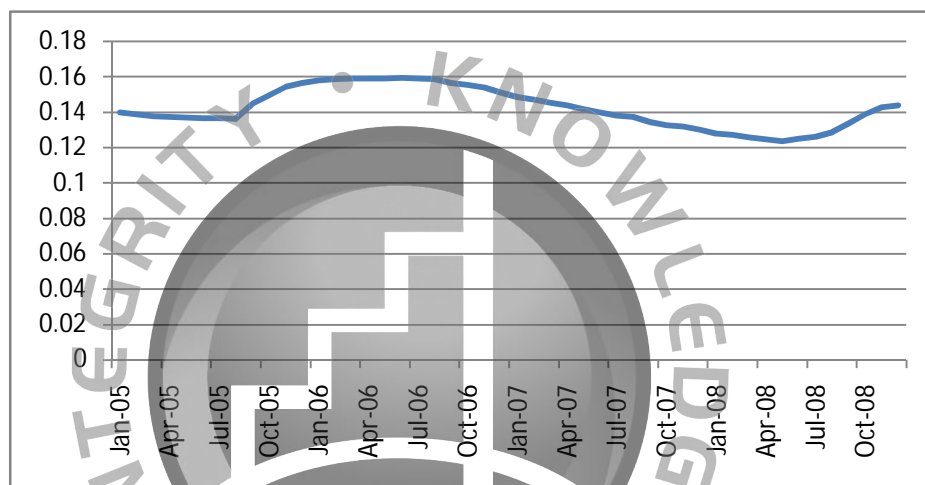
Sumber : Laporan publikasi Bank Indonesia (BI), data diolah

Berdasarkan grafik 4.4 besarnya bonus SBIS mengalami fluktuasi. Pada akhir tahun 2006, bonus SBIS mengalami peningkatan yang nampak cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa akhir tahun 2006 bonus SBIS sebesar 8.62%. Nilai tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan akhir tahun 2005 sebesar 5.42%. Sampai dengan akhir tahun 2008 besarnya bonus SBIS adalah sebesar 10.49%

4.2.1.5 Perkembangan Suku Bunga Kredit

Suku bunga kredit kategori investasi merupakan tingkat bunga yang diberikan oleh bank umum konvensional kepada debitur untuk tujuan investasi. Perkembangan suku bunga kredit investasi, nampak pada grafik berikut ini :

Grafik 4.5
Perkembangan Suku Bunga Kredit



Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), data diolah

Berdasarkan grafik 4.5, perkembangan suku bunga kredit masih dapat dikatakan stabil. Artinya, perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan. Selama periode penelitian, suku bunga kredit yang paling besar ditunjukkan hampir di sepanjang tahun 2006, yaitu nilainya sekitar 15%. Lalu, mengalami penurunan selama tahun 2007 dan pada awal tahun 2008 sebesar 12.81%.

4.2.2 Hasil Pengolahan Data

4.2.2.1 Uji Stasioneritas Data

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan uji stasioneritas data. Dari uji tersebut dapat diketahui nilai *ADF test statistic* dan *test critical value* (CV). Jika nilai $ADF\ test > CV$, maka menolak H_0 yang berarti data stasioner dan jika tidak maka sebaliknya. Nilai CV yang diambil pada 5%, berarti untuk tingkat keyakinan 95%. Dari uji stasioneritas pada tingkat level ternyata data tidak stasioner. Oleh karena itu, diuji kembali pada *first difference*. Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa semua data stasioner pada *first difference* ($ADF\ test\ statistic > critical\ value$).

Tabel 4.2
Hasil Uji Stasioaneritas Data

No.	Data	<i>ADF test statistic</i>	<i>Test critical value</i> (5%)	Kesimpulan	Keterangan
1.	LNPBH	-5.808865	-1.948140	Menolak H_0	Data Stasioner
2.	LNDPK	-5.034499	-1.948140	Menolak H_0	Data Stasioner
3.	CAR	-7.011287	-1.948140	Menolak H_0	Data Stasioner
4.	SBIS	-7.900104	-1.948140	Menolak H_0	Data Stasioner
5.	BUNGA	-2.635780	-1.948140	Menolak H_0	Data Stasioner

Sumber : Lampiran 3, data diolah

4.2.2.2 Uji Asumsi Klasik

Variabel terikat, yaitu jumlah pembiayaan bagi hasil pada saat ini dipengaruhi oleh variabel bebas DPK, CAR, bonus SBIS, dan bunga periode sebelumnya. Hal ini dilakukan karena terjadi kelambanan pada variabel terikat, yaitu pembiayaan bagi hasil. Sehingga, model yang digunakan adalah model *distributed lag*. Adapun hubungan antar variabel dapat diperlihatkan dalam persamaan berikut ini:

$$\text{LNBPB}_t = b_0 + b_1 \text{LNDPK}_{t-1} + b_2 \text{CAR}_{t-1} + b_3 \text{SBIS}_{t-1} + b_4 \text{Bunga}_{t-1} + e$$

Namun, hasil estimasi belum dapat dikatakan valid apabila persamaan yang diregresi belum memiliki sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Untuk memperoleh hasil estimasi yang baik dan sesuai hipotesis maka pengolahan data dalam model yang telah dibentuk harus memenuhi kriteria dan asumsi statistik. Dalam pengolahan data, kadang-kadang tidak secara langsung memberikan hasil yang terbaik. Seperti halnya terdapat masalah dalam pengujian asumsi klasik. Oleh sebab itu, data harus diolah lagi untuk menghasilkan nilai yang paling baik.

a. Uji Autokorelasi

Suatu model dikatakan memiliki masalah autokorelasi bila terjadi korelasi antar observasi dalam variabel yang sama. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier atau biasa disebut dengan *LM test*. Berdasarkan estimasi awal, dari hasil *LM test* didapatkan nilai probabilitas dari *Obs*R-squared* adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan cara untuk mengatasi autokorelasi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan prosedur “Cochrane-Orcutt”. Langkahnya dengan melakukan estimasi menggunakan persamaan $U_t = \rho u_{t-1} + e_t$. Dari langkah tersebut, maka dengan menggunakan Eviews 6 didapat nilai residual, yaitu $U(-1)$ sebesar 0.744082 yang merupakan nilai ρ .

Tabel 4.3**Hasil Estimasi Nilai Residual (ρ)**

Dependent Variable: U
 Method: Least Squares
 Date: 06/23/10 Time: 17:00
 Sample (adjusted): 2005M03 2008M12
 Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
U(-1)	0.744082	0.106118	7.011809	0.0000

Sumber : Lampiran 4, data diolah

Setelah mendapat taksiran berupa ρ , lalu nilai ρ digunakan untuk transformasi seluruh data yang ada di dalam model penelitian. Bentuk transformasi data yang digunakan sebagai berikut :

$$(\text{LN PBH}_t - (\rho * \text{LN PBH}_{t-1})) = (\text{LN DPK}_t - (\rho * \text{LN DPK}_{t-1})) + (\text{CAR}_t - (\rho * \text{CAR}_{t-1})) + (\text{SBIS}_t - (\rho * \text{SBIS}_{t-1})) + (\text{BUNGA}_t - (\rho * \text{BUNGA}_{t-1}))$$

Jika seluruh data telah ditransformasi, lalu kemudian akan digunakan untuk mengestimasi model tersebut. Maka, data secara otomatis telah ditransformasi sesuai dengan prosedur Cochrane Orcutt. Kemudian, hasil estimasi ini diuji kembali untuk melihat masih ada atau tidaknya masalah autokorelasi seperti nampak pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

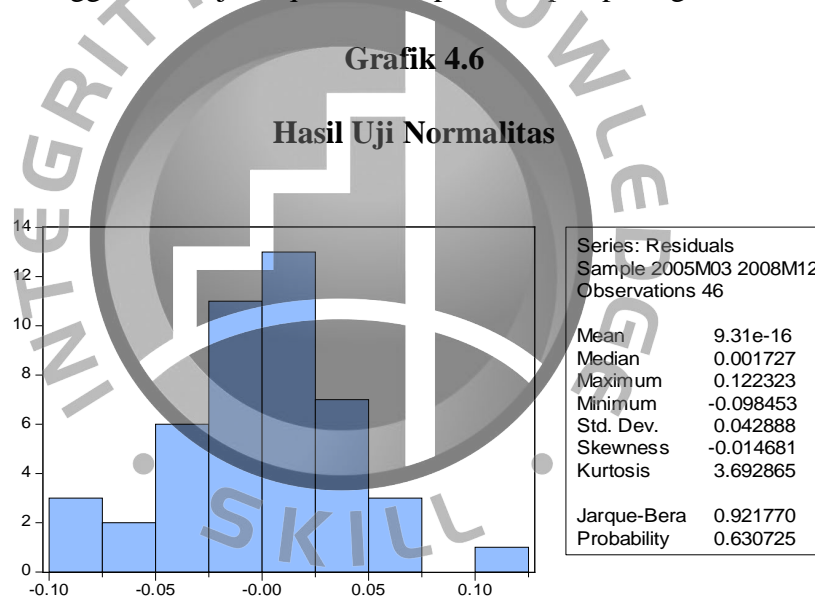
F-statistic	1.011839	Prob. F(2,39)	0.3729
Obs*R-squared	2.269157	Prob. Chi-Square(2)	0.3216

Sumber : Lampiran 6, data diolah

Berdasarkan uji Lagrange Multiplier pada tabel 4.4, nilai dari probabilitas Obs*R-squared adalah sebesar 0.3216. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0.05$, maka menerima H_0 atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model estimasi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model estimasi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera seperti tampak pada gambar berikut ini:



Sumber : Lampiran 7, data diolah

Berdasarkan Uji Jarque-Bera pada grafik 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel berdistribusi normal. Hal tersebut diketahui dari nilai probabilitasnya sebesar 0.630725 lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Maka hipotesa yang menyatakan bahwa residual u_1 berdistribusi normal tidak dapat ditolak atau dengan kata lain menerima H_0 .

c. Uji Multikolinieritas

Sebuah model persamaan dapat dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) apabila tidak terdapat multikolinieritas sesama variabel bebas. Cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinieritas adalah dengan menggunakan *correlation matrix*.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinieritas

	Correlation Matrix			
	LNDPK	CAR	SBIS	BUNGA
LNDPK	1.000000	-0.464730	0.415289	-0.461875
CAR	-0.464730	1.000000	-0.299374	0.267171
SBIS	0.415289	-0.299374	1.000000	-0.054111
BUNGA	-0.461875	0.267171	-0.054111	1.000000

Sumber : Lampiran 8, data diolah

Hasil besaran korelasi antar variabel bebas tampak bahwa semua variabel aman dari asumsi klasik multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun masing-masing variabel yang memiliki korelasi lebih dari 0,85. Maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Suatu model penelitian dikatakan baik apabila model terbebas dari heteroskedastis atau memiliki varian yang konstan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastik maka perlu dilakukan pengujian. Salah satu caranya dengan menggunakan uji Glejser.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.993178	Prob. F(4,41)	0.4221
Obs*R-squared	4.063458	Prob. Chi-Square(4)	0.3975
Scaled explained SS	4.296087	Prob. Chi-Square(4)	0.3674

Sumber : Lampiran 9, data diolah

Berdasarkan tabel 4.6, dengan menggunakan uji Glejser ditemukan bahwa nilai dari probabilitas Obs*R-squared sebesar 0.3975. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Hal ini menyimpulkan bahwa menerima H_0 atau tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisi regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data dengan program Eviews 6, maka hasil olahan data tampak pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7

Hasil Estimasi Persamaan Model

Dependent Variable: LNPBH

Method: Least Squares

Date: 06/23/10 Time: 17:01

Sample (adjusted): 2 47

Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.380902	0.577887	2.389572	0.0215
LNDPK(-1)	0.657143	0.133587	4.919200	0.0000
CAR(-1)	0.115504	0.545170	0.211868	0.8333
SBIS(-1)	0.989165	0.786967	1.256933	0.2159
BUNGA(-1)	-5.597573	2.105519	-2.658524	0.0111
R-squared	0.655928	Mean dependent var		3.850599
Adjusted R-squared	0.622360	S.D. dependent var		0.073115
S.E. of regression	0.044931	Akaike info criterion		-3.265045
Sum squared resid	0.082771	Schwarz criterion		-3.066279
Log likelihood	80.09603	Hannan-Quinn criter.		-3.190586
F-statistic	19.54025	Durbin-Watson stat		1.560075
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Lampiran 5, data diolah

Berdasarkan hasil estimasi variabel DPK, CAR, SBIS, dan suku bunga kredit terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil dapat ditunjukkan oleh persamaan, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{LNPBH} = & 1.380902 + 0.657143*\text{LNDPK}(-1) + 0.115504*\text{CAR}(-1) \\ & + 0.989165*\text{SBIS}(-1) - 5.597573*\text{BUNGA}(-1) \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut di atas dapat disusun interpretasi sebagai berikut:

1. Koefisien regresi LNDPK sebesar 0.657143 dan bertanda positif. Artinya, setiap kenaikan satu persen dana pihak ketiga periode sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka jumlah pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.657143 persen.

2. Koefisien regresi CAR sebesar 0.115504 dan bertanda positif. Artinya, setiap kenaikan satu persen CAR periode sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka jumlah pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar anti Ln dari 0.115504, yaitu 0.122439 rupiah.
3. Koefisien regresi SBIS sebesar 0.989165 dan bertanda positif. Artinya, setiap kenaikan satu persen bonus SBIS periode sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka jumlah pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar anti Ln dari 0.989165, yaitu 1.68898 rupiah.
4. Koefisien regresi BUNGA sebesar 5.597573 dan bertanda negatif. Artinya, setiap kenaikan satu persen BUNGA periode sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka jumlah pembiayaan bagi hasil akan mengalami penurunan sebesar anti Ln dari 5.597573, yaitu 0.99629 rupiah.

4.2.2.3 Pengujian Hipotesa

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji autokorelasi, normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tes hipotesis. Pada tahap ini dilakukan pengujian berupa uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t dari persamaan yang telah memenuhi kriteria BLUE.

a. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan output hasil estimasi pada Tabel 4.7 koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.6559 atau 65.59%. Sedangkan *adjusted R²* sebesar 0.6223 atau 62.23%. Hal ini menunjukkan bahwa DPK, CAR, SBIS dan suku bunga kredit mampu menjelaskan jumlah

pembiayaan bagi hasil sebesar 62.23%. Sisanya, yaitu sebesar 37.77% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

b. Uji F

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai Prob (F-statistik) sebesar $0.000 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Artinya keempat variabel, yaitu DPK, CAR, SBIS dan bunga secara bersama-sama mampu menjelaskan jumlah pembiayaan bagi hasil secara signifikan.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya yaitu DPK, CAR, SBIS, dan bunga terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.7, maka uji t untuk masing-masing hipotesa yang telah dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis untuk Dana Pihak Ketiga (DPK)

H_0 : DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : DPK berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan nilai probabilitas DPK sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa DPK secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

2. Hipotesis untuk tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*)

H_0 : CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : CAR berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan nilai probabilitas CAR sebesar 0.833, lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.833 > 0.05$), maka H_0 diterima. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa CAR tidak signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

3. Hipotesis untuk bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

H_0 : SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : SBIS berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan nilai probabilitas SBIS sebesar 0.215, lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.215 > 0.05$), maka H_0 diterima. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa bonus SBIS tidak signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

4. Hipotesis untuk suku bunga kredit bank umum konvensional

H_0 : Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

H_a : Bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan nilai probabilitas bunga sebesar 0.011, lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.011 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa suku bunga kredit secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

4.2.3 Pembahasan

4.2.3.1 Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan dan berkorelasi positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang dilakukan dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki oleh bank, maka semakin sedikit pula jumlah penyaluran pembiayaan. Menurut Wibowo (2007), salah satu faktor pengambilan keputusan dalam hal penyaluran dana, dapat dilihat dari besarnya DPK.

Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), DPK memiliki peranan yang penting untuk pengambilan keputusan pembiayaan. Pihak manajemen BMI selalu mempertimbangkan dana yang berhasil dihimpun untuk disalurkan pada pembiayaan. Adapun DPK yang dihimpun oleh BMI, yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang telah dilakukan oleh Asy'ari (2004), Anggraini (2005), Donna (2006), dan Hilmi (2006).

4.2.3.2 Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. CAR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kewajaran tingkat modal dalam memenuhi fungsinya untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan usaha yang dibiayai. CAR tidak berpengaruh signifikan saja terjadi karena CAR nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu,

sebagian besar jumlah pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh BMI berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga CAR yang nilainya kecil tidak berpengaruh secara langsung terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Besar kecilnya CAR, ternyata tidak diiringi dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh BMI. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tidak setiap kenaikan modal akan diikuti oleh kenaikan jumlah pembiayaan bagi hasil. Bank tetap dapat meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil selama peningkatan jumlah pembiayaan tersebut tidak menjadikan modal bank di bawah ketentuan Bank Indonesia.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CAR tidak menjadi pertimbangan BMI untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2006), tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2004) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR dengan pembiayaan.

4.2.3.3 Pengaruh Bonus SBIS terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil estimasi menunjukkan bahwa bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Penempatan kelebihan likuiditas dana dalam SBIS yang disediakan oleh Bank Indonesia, ternyata tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil secara signifikan. Walaupun SBIS sebagai sarana investasi bank syariah sama sekali tidak memiliki risiko, BMI tetap memberikan pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan penyimpanan likuiditas pada SBIS kurang begitu menarik karena persentase bonus yang relatif kecil. Namun, bank syariah memang tidak mampu menuntut karena sesuai dengan prinsipnya bahwa bonus yang diberikan atas

penempatan dana dalam SBIS hanya sekedar bonus. Sesuai dengan prinsipnya, bonus hanyalah sekedar pemberian, diperoleh atau tidaknya tidak dapat diharapkan dan tidak dapat pula dituntut atau dipaksakan.

Oleh karenanya cukup rasional jika besarnya bonus SBIS tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam menentukan besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat. Bonus SBIS bukan merupakan acuan yang digunakan BMI dalam memberikan pembiayaan bagi hasil. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2004). Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2006), ternyata peningkatan bonus SBIS mempengaruhi bank syariah untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk pembiayaan.

4.2.3.4 Pengaruh Suku Bunga Kredit terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil estimasi menunjukkan bahwa suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan dan berkorelasi negatif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini mungkin terjadi, dikarenakan ketika suku bunga kredit lebih besar daripada nisbah pembiayaan bagi hasil, BMI cenderung akan mengurangi jumlah pembiayaan bagi hasil. Ketika suku bunga kredit naik, BMI lebih banyak melakukan pembiayaan yang bersifat *murabahah* yang memiliki persentase yang hampir mendekati suku bunga kredit. Menurut Karnaen Perwataatmadja (2004), dengan besarnya transaksi *murabahah*, bank dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari margin dan harga jual lebih bersaing dengan suku bunga kredit bank konvensional. Pembiayaan *murabahah* sangat mirip dengan sistem pinjaman kredit bank konvensional yang menghitung bunga secara *fixed*. Terutama karena adanya faktor *mark-up*

yang menggunakan suku bunga sebagai *benchmark*. Oleh karena itu, bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional yang berbasis bunga.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hilmi (2006) dan Ibrahim (2005). Hasil ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ambarwati (2008) yang menyimpulkan bahwa suku bunga kredit berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Selain itu, Ambarwati juga menyimpulkan bahwa jumlah pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah* dengan pengaruh signifikan dan berkorelasi negatif.

4.2.3.5 Pengaruh DPK, CAR, bonus SBIS, dan suku bunga kredit terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil estimasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, yaitu DPK, CAR, bonus SBIS, dan suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Dengan kata lain, jumlah pembiayaan bagi hasil dapat diprediksi secara bersama-sama dari total keempat variabel bebas tersebut.

Keempat variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki peranan dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. Sehingga, keempat variabel bebas secara simultan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan jumlah pembiayaan bagi hasil yang akan disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pengaruh yang signifikan dari keempat variabel bebas, mencerminkan bahwa ada hubungan yang erat kaitannya dengan variabel terikat. Dengan demikian, variabel-variabel bebas tersebut secara bersamaan akan lebih berpengaruh terhadap keputusan BMI dalam menawarkan pembiayaan bagi hasil.

Pengaruh secara bersama-sama total DPK, CAR, bonus SBIS, dan suku bunga kredit terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada BMI harus dikelola dengan baik. Pengelolaan variabel tersebut tersebut tidak hanya dikonsentrasikan pada salah satu variabel bebas saja akan tetapi pengelolaan yang seimbang diantara variabel-variabel bebasnya. Pengelolaan pada total DPK, CAR, bonus SBIS, dan suku bunga kredit pada BMI, dimaksudkan agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil akan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan pembiayaan bagi hasil.

4.2.4 Argumentasi Penelitian

Pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dana yang berhasil dihimpun selalu diserap oleh masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif yang dapat memberikan keuntungan.

Selama periode 2005 sampai dengan 2008, perkembangan pembiayaan terus mengalami peningkatan. Walaupun dari skim pembiayaan yang paling banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah jenis pembiayaan *murabahah* memiliki porsi yang paling besar. Pengembangan porsi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) masih menjadi obsesi para praktisi perbankan syariah. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya, ciri utama perbankan syariah adalah dengan prinsip bagi hasil.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa tinggi rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel-variabel yang disinyalir turut mempengaruhi dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), bonus SBIS, dan suku bunga kredit.

Dalam penelitian ini, yang menunjukkan pengaruh yang signifikan adalah DPK dan suku bunga kredit. DPK memiliki hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Artinya, setiap penambahan DPK yang dihimpun Bank Muamalat Indonesia (BMI) akan menaikkan jumlah pembiayaan bagi hasil. Dana yang berasal dari masyarakat ini memiliki peran penting bagi besarnya jumlah pembiayaan bagi hasil. Oleh sebab itu, dana-dana tersebut harus dimaksimalkan karena secara absolut berkontribusi terhadap kegiatan utama bank, yaitu sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Variabel CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil karena porsi CAR yang lebih kecil dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang digunakan sebagai sumber dana pembiayaan bagi hasil. Walaupun ternyata faktor CAR tidak berpengaruh secara signifikan, akan tetapi sebaiknya CAR tetap menjadi pertimbangan BMI. Sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan bagi hasil, CAR seharusnya merupakan salah satu pertimbangan yang harus dilihat oleh pihak manajemen BMI. Dengan tingkat modal yang cukup tinggi, diharapkan pihak pengelola bank dapat selalu menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas yang dapat ditampung oleh permodalan bank. Apalagi pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan. Oleh sebab itu, bank harus memiliki modal yang cukup besar untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

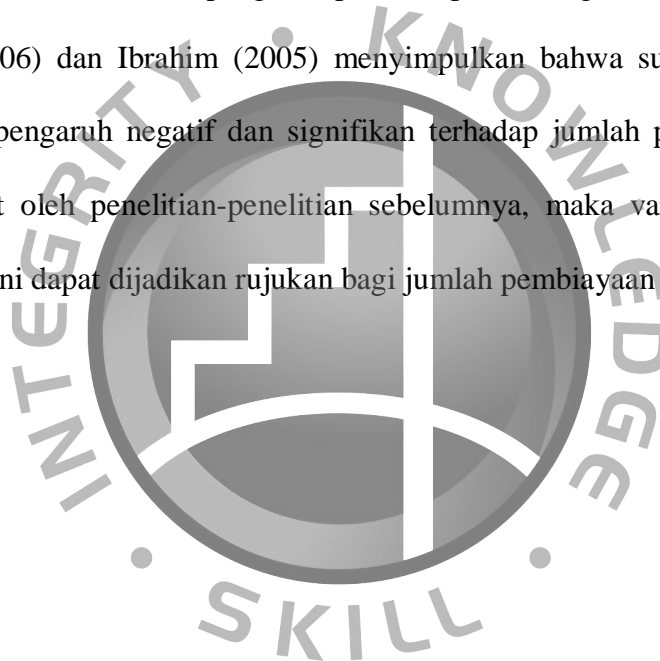
Begitu pula dengan variabel bonus SBIS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil karena bonus yang diberikan kurang begitu menarik bagi BMI. Oleh sebab itu, BMI cenderung untuk menyalurkannya pada pembiayaan bagi hasil dengan harapan keuntungan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dari pada hanya

menempatkan kelebihan dananya di SBIS. Dengan kata lain, BMI lebih memilih untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Variabel yang menunjukkan pengaruh yang signifikan selain DPK adalah suku bunga kredit. Walaupun BMI sebagai bank syariah tidak secara langsung berhubungan dengan suku bunga kredit. Namun, pada kenyataannya pengaruh suku bunga kredit memiliki korelasi terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini mungkin saja terjadi, karena pada kenyataannya BMI pun berkompetisi untuk mendapatkan nasabah. Menurut Karim (2006), meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari tingkat suku bunga tersebut. Hal ini disebabkan karena pasar yang dijangkau bank syariah tidak hanya untuk nasabah yang loyal terhadap syariah. Pada kenyataannya, bank syariah berkompetisi dengan bank konvensional untuk mendapatkan *customer* yang bersifat rasional, yaitu masyarakat yang masih dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, ketika suku bunga kredit naik, BMI lebih banyak menawarkan pembiayaan *murabahah* karena skim pembiayaan ini menggunakan *mark up* yang lebih dekat dengan perbankan konvensional. Jumlah porsi pembiayaan *murabahah* terbukti masih mendominasi dan menjadi sumber utama pendapatan bank syariah yang dapat memberi keuntungan dengan risiko yang kecil. Hal ini dilakukan karena keuntungan yang akan diperoleh bank akan lebih besar saat suku bunga kredit naik daripada nisbah pembiayaan bagi hasil, sehingga BMI cenderung untuk mengurangi pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan, bahwa pada kenyataannya sistem syariah di Indonesia masih belum terpisahkan dari sistem konvensional.

4.2.5 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Asy'ari (2004), Anggraini (2005), Donna (2006) dan Hilmi (2006) menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Siregar (2006) yang menyimpulkan bahwa rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap volume pembiayaan. Nurhayati (2004), yang menunjukkan hasil penelitian bahwa bonus SWBI berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Hilmi (2006) dan Ibrahim (2005) menyimpulkan bahwa suku bunga kredit bank konvensional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Dengan diperkuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi jumlah pembiayaan bagi hasil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel, yaitu DPK, CAR, SBIS dan bunga secara bersama-sama mampu menjelaskan jumlah pembiayaan bagi hasil secara signifikan pada $\alpha = 5\%$.
2. Berdasarkan hasil uji t variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Semakin banyak dana yang dihimpun, maka akan semakin banyak pula dana yang disalurkan. DPK memiliki kontribusi yang nyata dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.
3. Berdasarkan hasil uji t variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan karena nilai CAR yang lebih kecil daripada jumlah pembiayaan bagi hasil.
4. Berdasarkan hasil uji variabel bonus SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. SBIS tidak mempengaruhi secara signifikan karena besarnya bonus yang relatif kecil, sehingga tidak memberikan kontribusi nyata terhadap keputusan bank untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
5. Berdasarkan hasil uji variabel suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Suku bunga kredit memiliki pengaruh negatif

karena peningkatan suku bunga kredit akan menurunkan pembiayaan bagi hasil dan meningkatkan pembiayaan *murabahah* yang memiliki skim yang hampir sama dengan bank konvensional.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh di atas, maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Dari hasil penelitian, Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki kontribusi yang besar bagi jumlah pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, sebaiknya bank syariah lebih giat untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat, melalui kenaikan pangsa pasar BMI mengingat pangsa pasar BMI sebesar 23% dari total perbankan syariah di Indonesia. Pihak manajemen bank syariah dapat melakukan beberapa strategi agar lebih banyak menarik nasabah, seperti melakukan promosi dan meningkatkan bagi hasil untuk nasabah.
2. Bagi bank syariah, sebaiknya menurunkan porsi pembiayaan *murabahah* untuk dialihkan kepada pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sehingga pangsa pembiayaan bagi hasil akan meningkat. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan edukasi, sosialisasi dan promosi produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* kepada masyarakat. Bagaimana pun pembiayaan bagi hasil yang semakin besar memiliki efek domino yang lebih luas bagi perkembangan bank maupun sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Algoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. 2008. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek*. Bandung: Serambi.
- Aliman. Maret 2000. *Modul Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Ambarwati, Septiana. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Thesis, PSKTTI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendikia.
- Asy'ari, Mohamad Hasyim. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah*. Thesis, PSKTTI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Christie, Anita. 2007. *Faktor-Faktor yang Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri*. Thesis, PSKTTI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Donna, Duddy R dan Dumairy. Oktober 2006. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawarn Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Sosiosains, 19 (4). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Gujarati, Damodar. 2004. *Ekonometrika Dasar* Alih Bahasa oleh Sumarno Zein. Jakarta: Erlangga.
- Hadikoesoemo, Hatief. 2001. *Perbankan Syariah Nasional Perkembangan dan Arah Kebijakan Pengembangannya*. Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Jakarta.
- Hilmi. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri*. Thesis, PSKTTI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah*.
- Indonesia Banking School. 2010. *Pedoman dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Edisi II. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mannan, M. Abdul. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1996. *Bank Budgeting*. Edisi I. Yogyakarta: Badan Pendidikan Fakultas Ekonomi.

Perwataatmadja, Karnaen A. April 2004. *Perhitungan Margin Murabahah*. Artikel Majalah Modal. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 3rd Edition. New York: John Willey and Sons Inc.

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Siswati. 2009. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Net Performing Loan, dan Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Sumodiningrat, Gunawan. *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta : BPFE

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.

Wibowo, Muhammad Ghafur. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas UII.

Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN.

Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Referensi lainnya :

Al-Qur'annul Karim dan terjemahannya.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.*

Dewan Syariah Nasional, *No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Metode Distribusi Bagi Hasil.*

Peraturan Bank Indonesia. *No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah.*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah.*

<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/>

<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/>

<http://www.bi.go.id/biweb/Html/SekiTxt/T3x229.txt/>

<http://www.muamalatbank.com/>

LAMPIRAN 1

DATA

Periode	PBH (jutaan Rp)	DPK (jutaan Rp)	CAR	SBIS	BUNGA
Jan-05	1,981,117	4,157,627	14.00%	4.11%	13.98%
Feb-05	2,018,806	4,144,249	13.78%	3.75%	13.87%
Mar-05	2,381,828	4,308,330	11.72%	3.58%	13.78%
Apr-05	2,218,206	4,706,988	11.72%	4.49%	13.74%
May-05	2,294,996	4,564,387	18.12%	3.75%	13.68%
Jun-05	2,425,868	4,793,773	18.08%	4.62%	13.65%
Jul-05	2,484,081	4,850,667	16.34%	4.56%	13.65%
Aug-05	2,568,645	5,027,744	16.34%	3.92%	13.62%
Sep-05	2,633,872	5,180,001	16.70%	4.11%	14.47%
Oct-05	2,725,020	5,313,970	16.35%	4.77%	14.92%
Nov-05	2,719,306	5,365,090	15.63%	5.17%	15.43%
Dec-05	2,654,016	5,750,227	16.33%	5.42%	15.66%
Jan-06	2,630,766	5,702,021	19.96%	4.32%	15.81%
Feb-06	2,620,245	5,436,705	17.64%	4.62%	15.87%
Mar-06	2,658,168	5,487,803	16.88%	4.75%	15.90%
Apr-06	2,633,562	5,547,811	16.81%	4.80%	15.90%
May-06	2,687,455	5,775,222	16.10%	4.97%	15.89%
Jun-06	2,687,455	5,831,903	15.08%	4.95%	15.94%
Jul-06	2,694,490	5,858,172	15.18%	5.06%	15.91%
Aug-06	2,682,020	6,065,131	14.96%	5.79%	15.85%
Sep-06	2,753,335	6,354,609	14.47%	4.45%	15.66%
Oct-06	2,763,910	6,879,530	14.14%	5.33%	15.54%
Nov-06	2,707,676	6,850,770	14.36%	8.54%	15.38%
Dec-06	2,764,475	6,837,431	14.38%	8.62%	15.10%
Jan-07	2,696,514	6,666,904	16.18%	8.07%	14.85%
Feb-07	2,714,475	6,814,352	16.16%	4.53%	14.71%
Mar-07	2,666,615	7,069,942	14.85%	6.48%	14.53%
Apr-07	3,036,939	7,101,988	14.76%	6.27%	14.38%
May-07	3,296,918	7,368,741	13.92%	6.26%	14.16%
Jun-07	3,361,653	7,523,357	12.66%	5.33%	13.99%
Jul-07	3,562,920	7,756,264	11.89%	5.71%	13.82%
Aug-07	3,713,390	7,612,438	11.51%	5.15%	13.75%
Sep-07	3,833,613	7,980,620	11.23%	6.16%	13.45%

VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN



Periode	PBH (jutaan Rp)	DPK (jutaan Rp)	CAR	SBIS	BUNGA
Oct-07	3,850,024	8,270,685	11.03%	6.47%	13.28%
Nov-07	4,062,869	8,360,837	10.56%	6.87%	13.19%
Dec-07	4,151,281	8,691,328	10.69%	6.80%	13.01%
Jan-08	4,219,686	8,853,957	11.52%	5.95%	12.81%
Feb-08	4,219,686	8,972,850	11.27%	6.06%	12.71%
Mar-08	4,323,192	9,134,198	11.46%	6.32%	12.59%
Apr-08	4,371,397	9,290,423	11.25%	7.17%	12.47%
May-08	4,536,700	9,347,197	10.76%	7.36%	12.36%
Jun-08	4,568,858	9,341,632	9.57%	7.41%	12.51%
Jul-08	4,584,159	9,503,512	12.26%	7.70%	12.61%
Aug-08	4,718,238	9,486,243	11.81%	7.93%	12.86%
Sep-08	4,954,954	9,783,913	11.25%	8.60%	13.32%
Oct-08	4,947,861	9,751,644	10.89%	10.34%	13.88%
Nov-08	5,011,264	9,738,579	10.42%	9.41%	14.28%
Dec-08	4,984,381	10,073,955	10.56%	10.49%	14.40%



LAMPIRAN 2

DATA VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN SETELAH PBH DAN DPK DI LOGARITMA NATURAL (Ln)

Periode	LNPBH	LNDPK	CAR	SBIS	BUNGA
Jan-05	14.4992	15.2405	0.14	0.0411	0.1398
Feb-05	14.518	15.2372	0.1378	0.0375	0.1387
Mar-05	14.6834	15.2761	0.1172	0.0358	0.1378
Apr-05	14.6122	15.3646	0.1172	0.0449	0.1374
May-05	14.6462	15.3338	0.1812	0.0375	0.1368
Jun-05	14.7017	15.3828	0.1808	0.0462	0.1365
Jul-05	14.7254	15.3946	0.1634	0.0456	0.1365
Aug-05	14.7589	15.4305	0.1634	0.0392	0.1362
Sep-05	14.784	15.4603	0.167	0.0411	0.1447
Oct-05	14.818	15.4858	0.1635	0.0477	0.1492
Nov-05	14.8159	15.4954	0.1563	0.0517	0.1543
Dec-05	14.7916	15.5647	0.1633	0.0542	0.1566
Jan-06	14.7828	15.5563	0.1996	0.0432	0.1581
Feb-06	14.7788	15.5087	0.1764	0.0462	0.1587
Mar-06	14.7931	15.518	0.1688	0.0475	0.159
Apr-06	14.7838	15.5289	0.1681	0.048	0.159
May-06	14.8041	15.5691	0.161	0.0497	0.1589
Jun-06	14.8041	15.5789	0.1508	0.0495	0.1594
Jul-06	14.8067	15.5833	0.1518	0.0506	0.1591
Aug-06	14.8021	15.6181	0.1496	0.0579	0.1585
Sep-06	14.8283	15.6647	0.1447	0.0445	0.1566
Oct-06	14.8322	15.7441	0.1414	0.0533	0.1554
Nov-06	14.8116	15.7399	0.1436	0.0854	0.1538
Dec-06	14.8324	15.7379	0.1438	0.0862	0.151
Jan-07	14.8075	15.7127	0.1618	0.0807	0.1485
Feb-07	14.8141	15.7345	0.1616	0.0453	0.1471
Mar-07	14.7963	15.7714	0.1485	0.0648	0.1453
Apr-07	14.9264	15.7759	0.1476	0.0627	0.1438
May-07	15.0085	15.8128	0.1392	0.0626	0.1416
Jun-07	15.0279	15.8335	0.1266	0.0533	0.1399
Jul-07	15.0861	15.864	0.1189	0.0571	0.1382
Aug-07	15.1275	15.8453	0.1151	0.0515	0.1375

Sep-07	15.1593	15.8925	0.1123	0.0616	0.1345
Periode	LNPBH	LNDPK	CAR	SBIS	BUNGA
Oct-07	15.1636	15.9282	0.1103	0.0647	0.1328
Nov-07	15.2174	15.9391	0.1056	0.0687	0.1319
Dec-07	15.2389	15.9778	0.1069	0.068	0.1301
Feb-08	15.2552	16.009714	0.1127	0.0606	0.1271
Mar-08	15.2795	16.027536	0.1146	0.0632	0.1259
Apr-08	15.2905	16.044495	0.1125	0.0717	0.1247
May-08	15.3277	16.050587	0.1076	0.0736	0.1236
Jun-08	15.3347	16.049992	0.0957	0.0741	0.1251
Jul-08	15.3381	16.067172	0.1226	0.077	0.1261
Aug-08	15.3669	16.065353	0.1181	0.0793	0.1286
Sep-08	15.4158	16.09625	0.1125	0.086	0.1332
Oct-08	15.4144	16.092946	0.1089	0.1034	0.1388
Nov-08	15.4271	16.091606	0.1042	0.0941	0.1428
Dec-08	15.4218	16.125464	0.1056	0.1049	0.144



LAMPIRAN 3

UJI STASIONERITAS DATA DENGAN MENGGUNAKAN DICKEY FULLER

Null Hypothesis: D(LNPBH) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.808865	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.616203	
5% level	-1.948140	
10% level	-1.612320	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(LNPBH,2)
 Method: Least Squares
 Date: 08/13/10 Time: 14:11
 Sample (adjusted): 2005M03 2008M12
 Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LNPBH(-1))	-0.855088	0.147204	-5.808865	0.0000
R-squared	0.428469	Mean dependent var		-0.000527
Adjusted R-squared	0.428469	S.D. dependent var		0.056351
S.E. of regression	0.042601	Akaike info criterion		-3.452385
Sum squared resid	0.081668	Schwarz criterion		-3.412632
Log likelihood	80.40485	Hannan-Quinn criter.		-3.437493
Durbin-Watson stat	1.813812			

Null Hypothesis: D(LNDPK) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.034499	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.616203	
5% level	-1.948140	
10% level	-1.612320	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(LNDPK,2)
 Method: Least Squares
 Date: 08/13/10 Time: 14:13
 Sample (adjusted): 2005M03 2008M12
 Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LNDPK(-1))	-0.732339	0.145464	-5.034499	0.0000
R-squared	0.360037	Mean dependent var		0.000806
Adjusted R-squared	0.360037	S.D. dependent var		0.039697
S.E. of regression	0.031757	Akaike info criterion		-4.039912
Sum squared resid	0.045383	Schwarz criterion		-4.000159
Log likelihood	93.91799	Hannan-Quinn criter.		-4.025021
Durbin-Watson stat	2.048705			

Null Hypothesis: D(CAR) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.011287	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.616203	
5% level	-1.948140	
10% level	-1.612320	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(CAR,2)
 Method: Least Squares
 Date: 08/13/10 Time: 14:13
 Sample (adjusted): 2005M03 2008M12
 Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CAR(-1))	-1.044001	0.148903	-7.011287	0.0000
R-squared	0.522073	Mean dependent var		7.83E-05
Adjusted R-squared	0.522073	S.D. dependent var		0.020391
S.E. of regression	0.014097	Akaike info criterion		-5.664241
Sum squared resid	0.008942	Schwarz criterion		-5.624488
Log likelihood	131.2775	Hannan-Quinn criter.		-5.649349
Durbin-Watson stat	1.994573			

Null Hypothesis: D(SBIS) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.900104	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.616203	
5% level	-1.948140	
10% level	-1.612320	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(SBIS,2)
 Method: Least Squares
 Date: 08/13/10 Time: 14:14
 Sample (adjusted): 2005M03 2008M12
 Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(SBIS(-1))	-1.173900	0.148593	-7.900104	0.0000
R-squared	0.580868	Mean dependent var		0.000313
Adjusted R-squared	0.580868	S.D. dependent var		0.015138
S.E. of regression	0.009800	Akaike info criterion		-6.391311
Sum squared resid	0.004322	Schwarz criterion		-6.351558
Log likelihood	148.0001	Hannan-Quinn criter.		-6.376419
Durbin-Watson stat	2.023498			

Null Hypothesis: D(BUNGA) has a unit root
 Exogenous: None
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.635780	0.0095
Test critical values:		
1% level	-2.616203	
5% level	-1.948140	
10% level	-1.612320	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(BUNGA,2)
 Method: Least Squares
 Date: 08/13/10 Time: 14:14
 Sample (adjusted): 2005M03 2008M12
 Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(BUNGA(-1))	-0.267896	0.101638	-2.635780	0.0115
R-squared	0.133058	Mean dependent var		5.00E-05
Adjusted R-squared	0.133058	S.D. dependent var		0.001804
S.E. of regression	0.001680	Akaike info criterion		-9.918452
Sum squared resid	0.000127	Schwarz criterion		-9.878699
Log likelihood	229.1244	Hannan-Quinn criter.		-9.903560
Durbin-Watson stat	2.192161			

LAMPIRAN 4

HASIL ESTIMASI NILAI RESIDUAL (ρ)

Dependent Variable: U
Method: Least Squares
Date: 07/25/10 Time: 10:40
Sample (adjusted): 3 48
Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
U(-1)	0.744082	0.106118	7.011809	0.0000
R-squared	0.521804	Mean dependent var		0.001652
Adjusted R-squared	0.521804	S.D. dependent var		0.065182
S.E. of regression	0.045075	Akaike info criterion		-3.339489
Sum squared resid	0.091428	Schwarz criterion		-3.299736
Log likelihood	77.80825	Hannan-Quinn criter.		-3.324597
Durbin-Watson stat	1.817819			

LAMPIRAN 5

HASIL ESTIMASI PERSAMAAN MODEL

Dependent Variable: LNPBH
Method: Least Squares
Date: 07/07/10 Time: 15:34
Sample (adjusted): 2005M03 2008M12
Included observations: 46 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.380902	0.577887	2.389572	0.0215
LNDPK(-1)	0.657143	0.133587	4.919200	0.0000
CAR(-1)	0.115504	0.545170	0.211868	0.8333
SBIS(-1)	0.989165	0.786967	1.256933	0.2159
BUNGA(-1)	-5.597573	2.105519	-2.658524	0.0111

R-squared	0.655928	Mean dependent var	3.850599
Adjusted R-squared	0.622360	S.D. dependent var	0.073115
S.E. of regression	0.044931	Akaike info criterion	-3.265045
Sum squared resid	0.082771	Schwarz criterion	-3.066279
Log likelihood	80.09603	Hannan-Quinn criter.	-3.190586
F-statistic	19.54025	Durbin-Watson stat	1.560075
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 6

HASIL UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.011839	Prob. F(2,39)	0.3729
Obs*R-squared	2.269157	Prob. Chi-Square(2)	0.3216

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/07/10 Time: 15:35

Sample: 2005M03 2008M12

Included observations: 46

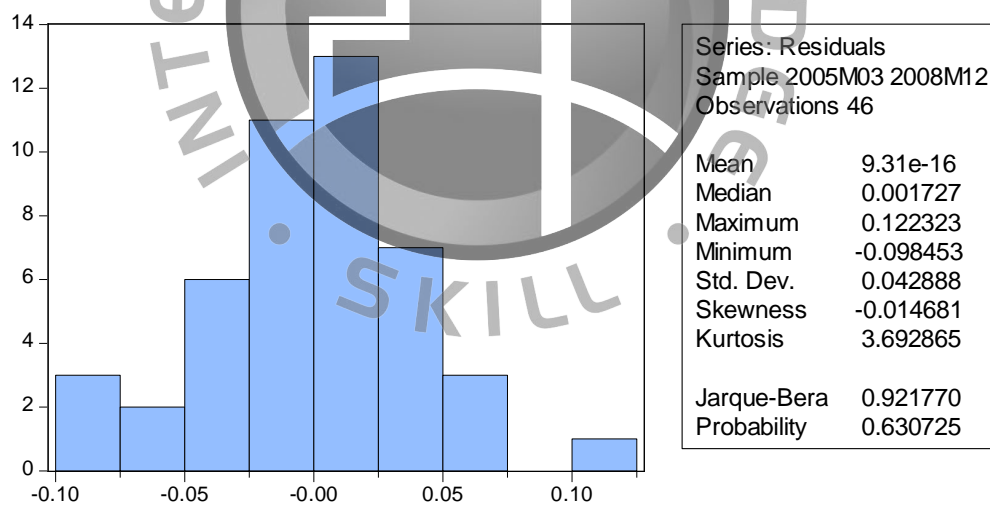
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.112535	0.583124	0.192987	0.8480
LNDPK(-1)	-0.025073	0.134708	-0.186130	0.8533
CAR(-1)	0.497635	0.649668	0.765984	0.4483
SBIS(-1)	0.136286	0.802574	0.169811	0.8660
BUNGA(-1)	-0.825919	2.184206	-0.378133	0.7074
RESID(-1)	0.169801	0.179512	0.945904	0.3500
RESID(-2)	0.218014	0.185170	1.177371	0.2462

R-squared	0.049330	Mean dependent var	9.31E-16
Adjusted R-squared	-0.096927	S.D. dependent var	0.042888
S.E. of regression	0.044918	Akaike info criterion	-3.228676
Sum squared resid	0.078688	Schwarz criterion	-2.950404
Log likelihood	81.25955	Hannan-Quinn criter.	-3.124434
F-statistic	0.337280	Durbin-Watson stat	1.843328
Prob(F-statistic)	0.912957		

LAMPIRAN 7

HASIL UJI NORMALITAS



LAMPIRAN 8

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Correlation Matrix				
	LNDPK	CAR	SBIS	BUNGA
LNDPK	1.000000	-0.464730	0.415289	-0.461875
CAR	-0.464730	1.000000	-0.299374	0.267171
SBIS	0.415289	-0.299374	1.000000	-0.054111
BUNGA	-0.461875	0.267171	-0.054111	1.000000

LAMPIRAN 9

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.993178	Prob. F(4,41)	0.4221
Obs*R-squared	4.063458	Prob. Chi-Square(4)	0.3975
Scaled explained SS	4.296087	Prob. Chi-Square(4)	0.3674

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 07/07/10 Time: 15:47

Sample: 2005M03 2008M12

Included observations: 46

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.707125	0.362257	1.952000	0.0578
LNDPK(-1)	-0.158585	0.083741	-1.893749	0.0653
CAR(-1)	-0.397034	0.341748	-1.161776	0.2520
SBIS(-1)	0.272560	0.493322	0.552500	0.5836
BUNGA(-1)	-0.689358	1.319875	-0.522291	0.6043

R-squared	0.088336	Mean dependent var	0.031997
Adjusted R-squared	-0.000607	S.D. dependent var	0.028157
S.E. of regression	0.028166	Akaike info criterion	-4.199094
Sum squared resid	0.032526	Schwarz criterion	-4.000329
Log likelihood	101.5792	Hannan-Quinn criter.	-4.124636

F-statistic	0.993178	Durbin-Watson stat	1.091621
Prob(F-statistic)	0.422140		

LAMPIRAN 10

PERSYARATAN UMUM PEMBIAYAAN BANK MUAMALAT INDONESIA

**Pembiayaan
Konsumtif dengan
pengajuan minimal
Rp, 50 juta (plafond)**

Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)

Masa kerja minimal dua tahun

Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah

Foto kopi Kartu Keluarga

Foto kopi Surat Nikah

Surat persetujuan suami/istri

Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir

Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan

Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta)

	<p>Rekening bank selama 3 bulan terakhir</p> <p>Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli)</p> <p>Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok</p>
<p>Pembiayaan Koperasi</p>	<p>Surat Permohonan</p> <p>Foto kopi NPWP</p> <p>Foto kopi SIUP</p> <p>Foto kopi TDP</p> <p>AD/ART Koperasi dan perubahannya</p> <p>Surat pengesahan dari Departemen Koperasi</p> <p>Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi</p> <p>Laporan Keuangan 2 tahun terakhir</p> <p>Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir</p> <p>Cash flow projection selama masa pembiayaan</p> <p>Data jaminan</p> <p>Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha</p> <p>Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat</p>
<p>Pembiayaan Korporasi (PT/CV)</p>	<p>Surat Permohonan</p> <p>Foto kopi NPWP</p> <p>Foto kopi SIUP</p> <p>Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya</p> <p>Foto kopi KTP Direksi</p>

Company Profile

Akta pendirian dan perubahannya

Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman

Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir

Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

Cash flow projection selama masa pembiayaan

Data jaminan

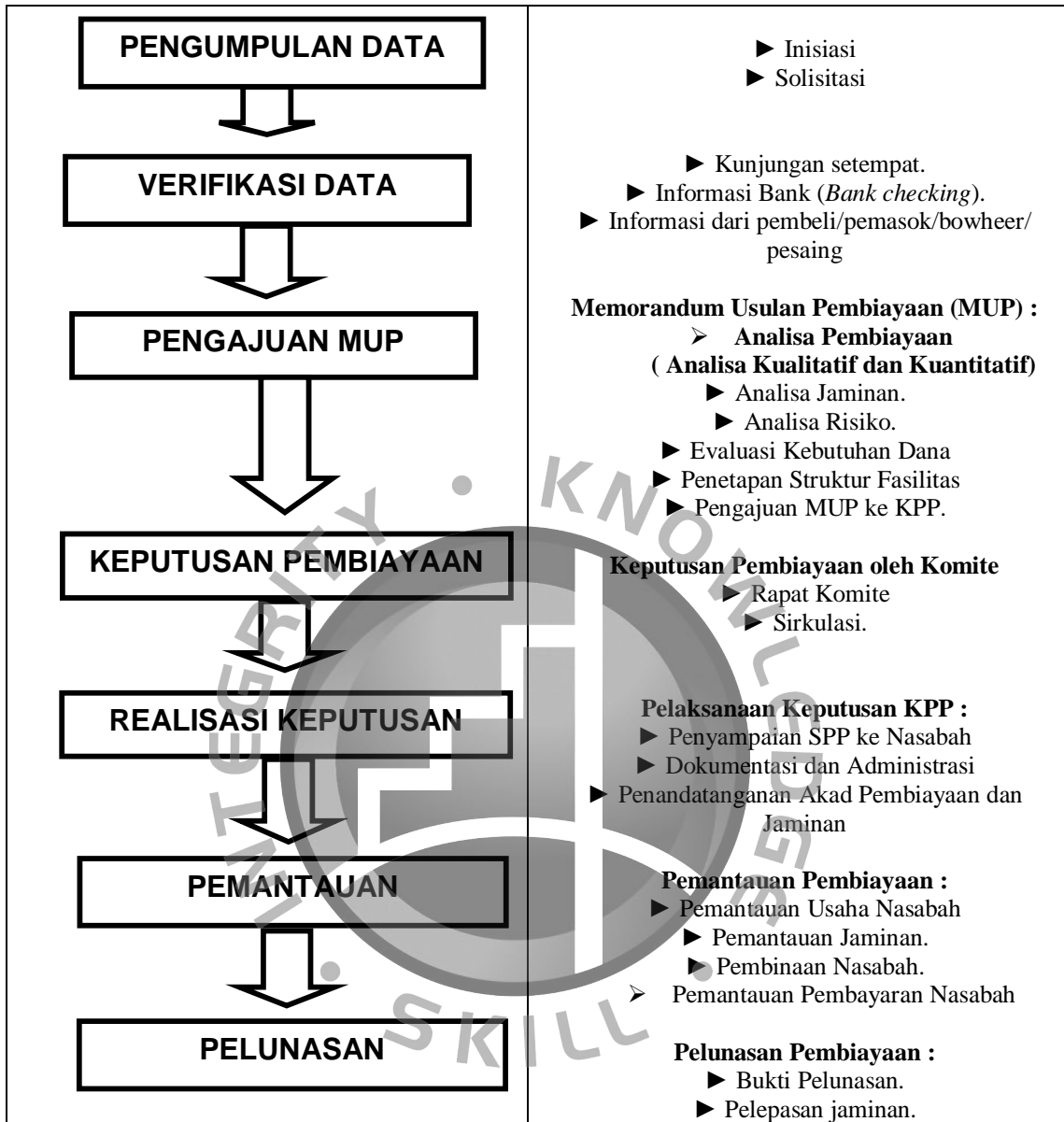
Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha

Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

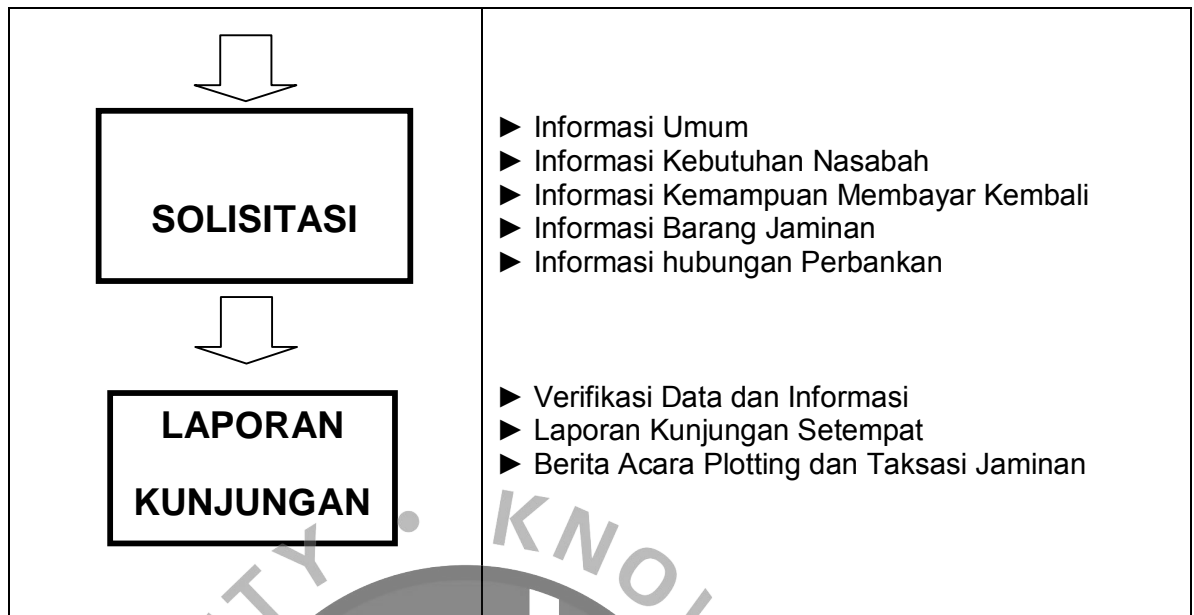
LAMPIRAN 11

LANGKAH-LANGKAH PROSES PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

LANGKAH	KEGIATAN
---------	----------



LANGKAH	KEGIATAN
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INISIASI</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tahapan : ▪ Penetapan Target Market <li style="padding-left: 20px;">▪ Penetapan Sektor Bisnis ▶ Kriteria Nasabah : Ekstern & Intern ▶ Penghimpunan Informasi/ Taaruf



TAHAPAN INISIASI :

Tahapan dalam melakukan inisiasi, yaitu :

A. **PENETAPAN TARGET MARKET**

Dalam menetapkan target market Bank perlu memperhatikan Sektor Ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut.

Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain :

- Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry)
- Bisnis yang tidak terkena resesi
- Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah
- Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas

Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain :

- Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian
- Pertambangan
- Industri Pengolahan

- Listrik, Gas & Air
- Konstruksi
- Perdagangan, Restoran dan Hotel
- Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi
- Jasa-jasa dunia usaha
- Jasa-jasa sosial / masyarakat
- Lain-lain

PENGHIMPUNAN INFORMASI

Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta'aruf dan wawancara.

Ta'aruf adalah proses awal pengenalan antara A/M dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara tersebut A/M akan memperoleh data-data sementara tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan A/M memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data tadi.

Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan bagi A/M, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara.

Selanjutnya masih dalam proses *ta'aruf*, diperlukan adanya data standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan wawancara.

Dari data standar itu pula para A/M bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak.

Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus mencakup hal-hal antara lain:

- A. Kelengkapan data pemohon.
- B. Penjelasan data-data pendukung.
- C. Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.

SOLISITASI

Solitisasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil solitisasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report).

Dalam menjalankan solitisasi, A/M harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif.

Adapun standar informasi yang dimaksud adalah :

INFORMASI UMUM

- A. Informasi yang diperoleh adalah tentang eksistensi perusahaan itu sendiri, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang operasi bisnis secara keseluruhan termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran yang ingin dicapai, rencana kerja, sejarah perusahaan, para pendiri dan pemegang saham, serta prospek masa depan perusahaan.
- B. Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem penggajian, dan jaminan sosial lain.

INFORMASI KEBUTUHAN NASABAH

Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan, teknologi yang digunakan, *franchising management assistances* (waralaba) atau perjanjian bisnis dengan pihak ketiga yang lain (bila ada), prospek masa depan bidang usaha.

INFORMASI KEMAMPUAN PEMBAYARAN KEMBALI

- A. Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban (repayment) umumnya tergantung dari kondisi dan hasil produksi itu sendiri, seperti cara pemasaran, perusahaan pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan calon nasabah dibandingkan dengan perusahaan pesaing, distribusi produk, strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang.

- B. Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara pengadaan bahan baku, ciri khusus bahan baku.
- C. Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan atau sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat.
- D. Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain.

INFORMASI JAMINAN

Dalam menghimpun informasi jaminan Unit Support Pembiayaan (USP) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan marketable.
- B. Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya.
- C. Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi.

INFORMASI HUBUNGAN PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan serta term dan kondisi fasilitas.
- B. Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondite calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama.

C. Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan Rugi Laba serta agar diketahui mengapa nasabah tersebut ingin berhubungan dengan Bank Muamalat.

LAPORAN KUNJUNGAN

Laporan Kunjungan (Call Report / On The Spot (OTS)) adalah laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh Account Manager (AM) dan diketahui atasannya, sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya.

Garis besar pelaksanaan OTS adalah sebagai berikut :

SUMBER DATA	INFORMASI YANG DIPERLUKAN
▶ Kantor Nasabah	→ Kas dan Bank → Persediaan → Harta Tetap → Piutang Dagang → Hutang Dagang → Keadaan Pegawai
▶ Pabrik / Toko / Lokasi Usaha / Lokasi Proyek	→ Persediaan → Harta Tetap → Fasilitas Produksi / Usaha → Fasilitas Penyimpanan → Keadaan Proyek (konstruksi) → Hasil Produksi / Barang Dagangan → Keadaan Pegawai
▶ Kantor / Pabrik / Toko dari Pemasok / Pembeli / Bowheer	→ Piutang/ Hutang Dagang → Volume penjualan / pembelian

	<ul style="list-style-type: none"> → Syarat-syarat penjualan / pembelian → Waktu penyerahan barang → Waktu dan riwayat pembayaran → Tingkat kepuasan → SPK / kontrak → Tingkat penyelesaian pekerjaan → Kuantitas dan kualitas peralatan
<p>► Jaminan</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Lokasi dan plotting → Kondisi → Bukti Kepemilikan → Ijin → Pemanfaatan → Penghuni → Kapasitas (untuk mesin) → Umur teknis (untuk mesin) → Harga Pasar.

Laporan OTS sekurang-kurangnya harus berisikan :

1. Hari dan Tanggal Kunjungan.
2. Nama Kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan.
3. Tempat / lokasi kunjungan.
4. Nama orang (berikut jabatannya) yang dimintakan informasi.
5. Tujuan kunjungan.
6. Hasil dan Kesimpulan Kunjungan.
7. Tanda tangan pejabat / pengelola yang melakukan kunjungan.

PROSES ANALISIS PEMBIAYAAN

Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (*first way out*) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (*second way out*) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan.

Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi:

- A. Analisa Aspek-aspek Perusahaan
- B. Analisa Laporan Keuangan
- C. Evaluasi Kebutuhan Dana / Pembiayaan
- D. Analisa Kesuaian Aspek Syariah
- E. Struktur Fasilitas Pembiayaan



LAMPIRAN 12

**FLOWCHART KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
PADA BANK MUAMALAT**

